



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 22 Tlp. (022) 4232448-4233347-4230963
Faksimili: (022) 4203450 Website: <http://www.jabarprov.go.id> e-mail:
info@jabarprov.go.id Bandung 40132

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 048/Kep.359-Diskominfo/2023
TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2023-2028

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, perlu disusun arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2028;
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



FE1526ABC7

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FE1526ABC7>

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 183);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1375);



14. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, statistik, dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 284);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 161 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 162);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Satu Data Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 48);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
24. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.195-Org/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.573-Org/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 120/Kep.195-Org/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;



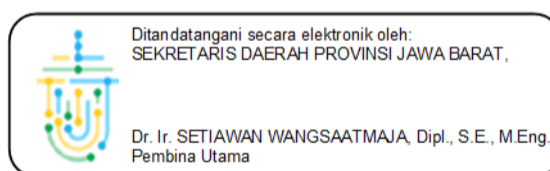
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memuat:
- a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur, meliputi:
 1. domain arsitektur proses bisnis;
 2. domain arsitektur data dan informasi;
 3. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 4. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 5. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 6. domain arsitektur layanan SPBE.
- KETIGA : Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai pedoman dalam proses integrasi layanan SPBE h antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Juni 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 048/Kep.359-Diskominfo/2023

TANGGAL : 26 JUNI 2023

TENTANG : ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN
2023-2028.

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2023-2028



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/FE1526ABC7>

FE1526ABC7

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Pemda, menyusun Arsitektur SPBE Pemda dengan mengacu pada Arsitektur SPBE Nasional. Untuk itu dalam penyusunannya Arsitektur SPBE Pemda dibangun dan dikembangkan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional. Keselarasan dilakukan melalui penggunaan referensi arsitektur. Selanjutnya Arsitektur SPBE Pemda disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan menjadi dasar untuk:

1. Penyusunan Proses Bisnis;
2. Berbagi pakai Data dan Informasi;
3. Penyelenggaraan Infrastruktur SPBE;
4. Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus;
5. Penerapan Keamanan SPBE;
6. Penerapan integrasi Layanan SPBE;
7. Penyusunan Peta Rencana SPBE;
8. Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE.

Arsitektur SPBE Pemda dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Reviu Arsitektur SPBE Pemda dilakukan berdasarkan:

1. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
2. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemda; dan
3. Perubahan pada Unsur SPBE Pemda atau perubahan rencana strategis Pemda untuk Arsitektur SPBE.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari disusunnya Arsitektur SPBE Pemda adalah untuk mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Pemda yang terintegrasi.

Sedangkan tujuan dari disusunnya Arsitektur SPBE Pemda memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi,



Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan operasional Layanan SPBE Pemda yang terpadu.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi SPBE Pemda

Selaras dengan arah kebijakan dan strategi SPBE Nasional, arah kebijakan dan strategi SPBE Pemda melingkupi Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan sumber daya manusia SPBE Pemda.

1. Tata Kelola SPBE Pemda

Diarahkan untuk perbaikan Tata Kelola SPBE Pemda dengan melakukan penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE Pemda dan kebijakan SPBE Pemda untuk mewujudkan SPBE Pemda yang terpadu dan menyeluruh. Perbaikan tata kelola dicapai melalui pembentukan tim koordinasi SPBE Pemda, pembangunan Arsitektur SPBE Pemda, penyederhanaan dan pengintegrasian Proses Bisnis pemerintahan di Pemda, dan penyusunan kebijakan SPBE Pemda yang terpadu. Inisiatif strategis dari kegiatan Tata Kelola SPBE Pemda dilaksanakan dengan tahapan berikut:

- a. Penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Pembangunan Arsitektur SPBE Pemda;
- c. Penyelarasan Arsitektur SPBE Pemda dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemda Kabupaten/Kota.

2. Layanan SPBE Pemda

Diarahkan untuk peningkatan kualitas layanan pemerintah di tingkat Pemda dengan melakukan pengembangan layanan yang berorientasi kepada pengguna, terintegrasi, dan berkesinambungan serta membuka ruang partisipasi masyarakat. Inisiatif strategis dari kegiatan Layanan SPBE Pemda berupa:

- a. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi;
- b. Membangun portal layanan publik terintegrasi, portal layanan administrasi pemerintahan terintegrasi, dan portal satu data Jawa Barat;
- c. Pemanfaatan portal layanan publik yang terintegrasi;



- d. Pemanfaatan portal layanan administrasi pemerintahan yang terintegrasi;
- e. Pemanfaatan portal satu data Jawa Barat;
- f. Penerapan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

3. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Penyelenggaraan TIK Pemda diarahkan untuk pengintegrasian TIK Pemda dengan melakukan pengintegrasian data dan informasi di tingkat Pemda, Aplikasi SPBE Pemda, dan Infrastruktur SPBE Pemda.

Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:

- mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
- terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
- terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE;
- menjangkau semua layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah;
- teknologi layanan berbagi pakai, merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan platform, layanan infrastruktur, layanan analitika data, dan layanan kanal komunikasi.

Inisiatif strategis dari TIK Pemda berupa:

- a. Pendayagunaan pusat komputasi Pemda dan pusat data nasional;
- b. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemda;
- c. Penyediaan Jaringan Internet Pemda;
- d. Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemda;
- e. Pembangunan sistem keamanan informasi Pemda;
- f. Pemanfaatan teknologi analitika data untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat; dan
- g. Penyelenggaraan manajemen TIK SPBE Pemda.

4. Sumber Daya Manusia SPBE Pemda

Sumber daya manusia SPBE Pemda diarahkan dengan melakukan pengembangan kepemimpinan SPBE Pemda serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia Pemda. Pengembangan sumber daya manusia

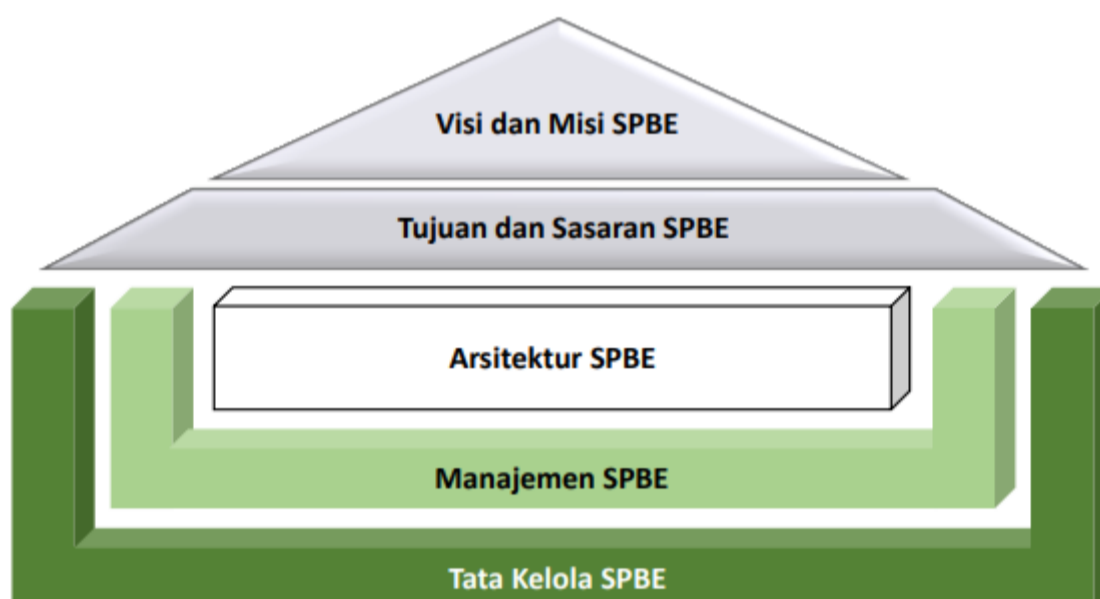


SPBE Pemda dapat dicapai melalui peningkatan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE Pemda, pembangunan budaya kerja berbasis SPBE Pemda, pengembangan jabatan fungsional, dan pelaksanaan kemitraan dengan berbagai pihak. Inisiatif strategis dari kegiatan sumber daya manusia SPBE Pemda berupa:

- a. Promosi literasi SPBE;
- b. Peningkatan kapasitas ASN penyelenggara SPBE Pemda;
- c. Pemanfaatan forum kolaborasi SPBE antara Pemda, pemerintah dan non pemerintah; dan
- d. Penyelenggaraan Manajemen Sumber Daya Manusia SPBE Pemda.

B. Kerangka Kerja SPBE Pemda

Kerangka kerja SPBE Pemda pada dasarnya merupakan sebuah struktur yang dirancang untuk melaksanakan SPBE Pemda. Kerangka kerja SPBE Pemda tersusun dari visi, misi, tujuan dan sasaran SPBE Nasional, serta Tata Kelola SPBE Pemda, Manajemen SPBE Pemda, dan Arsitektur SPBE Pemda.



Gambar 2.1. Kerangka Kerja SPBE

1. Visi SPBE Nasional

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.

2. Misi SPBE Nasional

Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis untuk mencapai visi SPBE, misi SPBE adalah:



FE1526ABC7

1. melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu;
2. mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas;
3. membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan
4. membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

3. Tujuan SPBE Nasional

Berdasarkan visi dan misi SPBE, tujuan SPBE adalah:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

4. Sasaran SPBE Nasional

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE, sasaran SPBE adalah:

1. terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien;
2. terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna;
3. terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan
4. meningkatnya kapasitas SDM SPBE.

5. Tata Kelola SPBE Pemda

Tata Kelola SPBE Pemda adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu di lingkungan Pemda. Tata Kelola SPBE Pemda diterapkan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Pemda, antara lain:

- a. Arsitektur SPBE;
- b. Peta Rencana SPBE;
- c. Rencana dan Anggaran SPBE;
- d. Proses Bisnis SPBE;
- e. Data dan Informasi;
- f. Infrastruktur SPBE;
- g. Aplikasi SPBE;
- h. Keamanan SPBE;
- i. Layanan SPBE.



6. Manajemen SPBE Pemda

Manajemen SPBE Pemda adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas di lingkungan Pemda. Untuk menjamin kualitas dan memastikan kepatuhan dalam pelaksanaan kebijakan Manajemen SPBE Pemda, maka dilaksanakan Audit TIK secara berkala.

7. Arsitektur SPBE Pemda

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

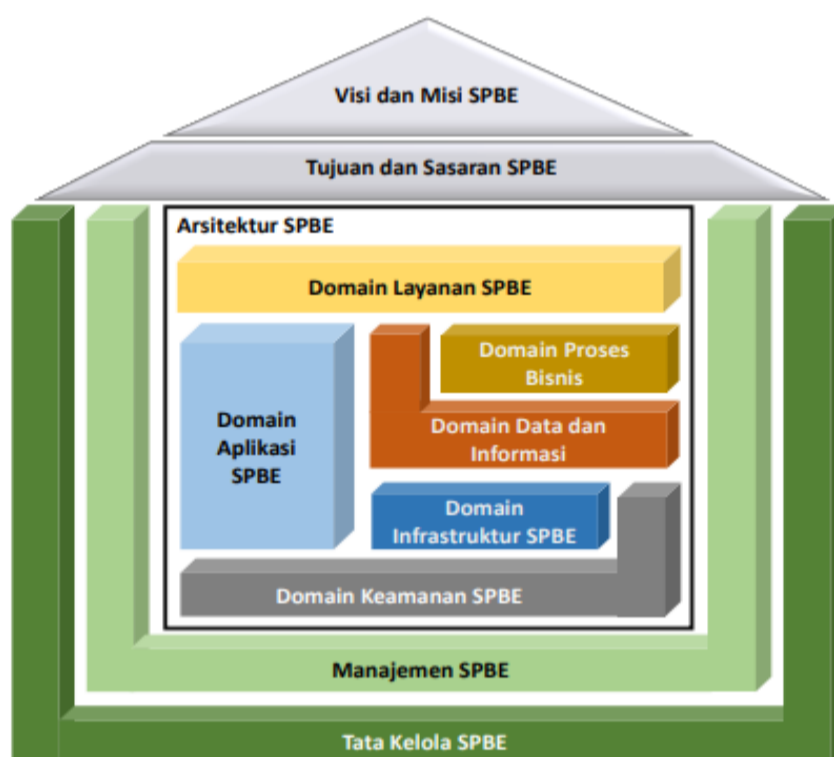
Arsitektur SPBE Pemda adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di Pemda. Arsitektur SPBE Pemda dijelaskan lebih rinci pada BAB V.



BAB III

KERANGKA KERJA ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH

Selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemda memiliki pola agar dapat menghasilkan layanan digital pemerintah terintegrasi di Pemda. Pola yang dilakukan yaitu dengan melakukan identifikasi layanan pemerintah terintegrasi di Pemda dari domain Proses Bisnis, domain data dan informasi, serta domain Layanan SPBE Pemda, yang selanjutnya akan didukung oleh aspek TIK melalui domain Aplikasi SPBE Pemda, domain Infrastruktur SPBE Pemda, dan domain Keamanan SPBE Pemda.



Gambar 3.1. Kerangka Kerja Arsitektur SPBE dalam Kerangka Kerja SPBE

Arsitektur SPBE terdiri atas Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE. Referensi arsitektur SPBE terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:

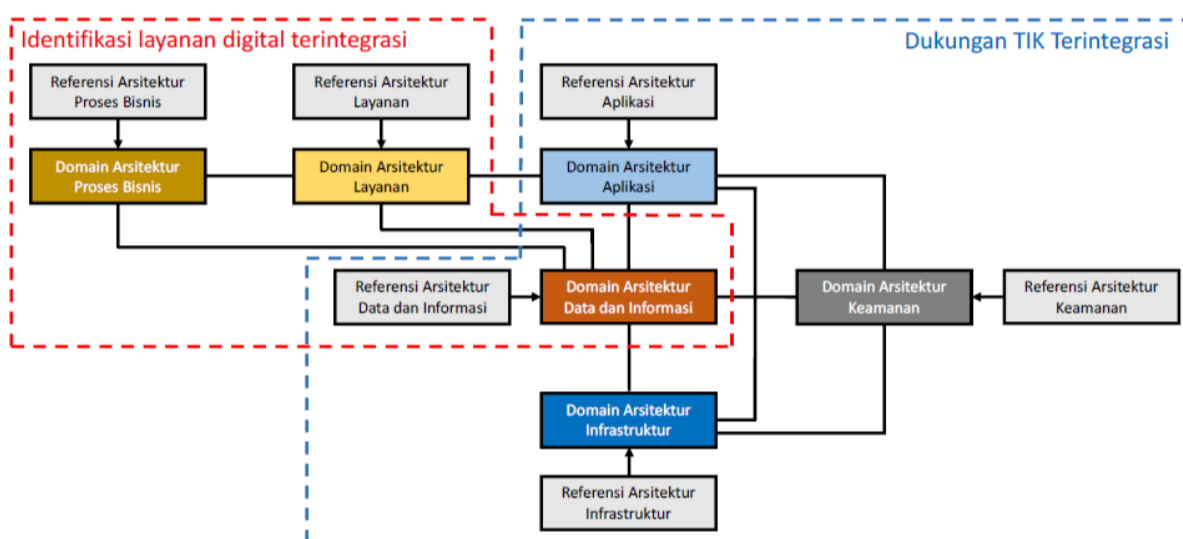
- a. referensi arsitektur proses bisnis;
- b. referensi arsitektur data dan informasi;
- c. referensi arsitektur layanan SPBE;
- d. referensi arsitektur aplikasi SPBE;
- e. referensi arsitektur infrastruktur SPBE;
- f. referensi arsitektur keamanan SPBE.

Sedangkan Domain Arsitektur SPBE juga terdiri atas 6 (enam) komponen, yaitu:



- a. domain arsitektur proses bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur layanan SPBE;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
- e. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
- f. domain arsitektur keamanan SPBE.

Secara garis besar keterkaitan antara semua Referensi Arsitektur SPBE dengan semua domain arsitekturnya tergambar pada Gambar 3.2. Pada ilustrasi kerangka kerja arsitektur dapat dilihat pengelompokan kegiatan penyelenggaraan SPBE yang terkait dengan identifikasi layanan digital terintegrasi (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna merah) dan identifikasi dukungan teknologi informasi dan komunikasi terintegrasi yang diperlukan (tergambar dalam kotak bergaris putus-putus berwarna biru).



Gambar 3.2. Keterkaitan Antar Komponen dalam Arsitektur SPBE

A. Kerangka Kerja Arsitektur Proses Bisnis

Pada domain arsitektur proses bisnis dilakukan klasifikasi jenis tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara serta Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara. Domain proses bisnis disusun dengan cara menjabarkan tugas dan fungsi pemerintahan dari fungsi-fungsi kementerian berdasarkan standar penamaan urusan pemerintahan.

Dengan adanya klasifikasi berupa pengelompokan tugas dan fungsi pemerintahan di internal Pemerintah Daerah, maka dapat menggambarkan potensi kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat serta pengintegrasian secara terpadu di setiap elemen pemerintahan dalam melakukan tugas dan fungsi yang diemban. Klasifikasi proses bisnis, dilakukan secara umum dan tidak terikat dengan organisasi yang ada, maka diharapkan



dapat mengakomodasi setiap fungsi organisasi di internal Pemerintah Daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintahan, dengan tidak membedakan organisasi yang mengemban urusan pemerintahan tertentu.

1. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

Dalam domain arsitektur proses bisnis pemerintahan yang diemban oleh instansi pemerintah, selanjutnya diklasifikasikan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur proses bisnis yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. sektor pemerintahan, yang mengelompokkan substansi proses bisnis pemerintahan ke dalam sektor pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. urusan pemerintahan, yang menjelaskan turunan dari sektor pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam urusan pemerintahan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. fungsi pemerintahan, yang menjelaskan lebih rinci dari urusan pemerintahan di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), Pemerintah Daerah mendefinisikan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. sub fungsi pemerintahan yang menjelaskan lebih rinci dari fungsi pemerintahan sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan dan layanan terintegrasi yang akan dibangun sebagai bagian dari layanan digital nasional.

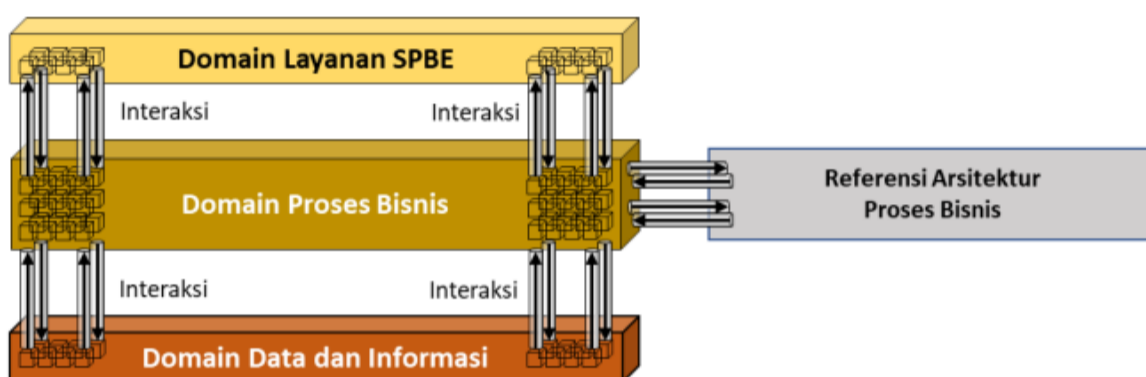


Gambar 3.3. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis

2. Keterkaitan Antar Domain



Domain arsitektur proses bisnis terdiri dari berbagai macam proses bisnis pemerintahan yang menghasilkan berbagai macam data dan informasi, serta mendefinisikan layanan pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah. Dengan adanya keterkaitan antar domain arsitektur lainnya dalam SPBE, maka dapat direlasikan informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang dilakukan, sebagai contoh melihat layanan-layanan yang dihasilkan dalam urusan pemerintahan tersebut, atau aplikasi dan infrastruktur apa saja yang mendukung, atau data dan informasi apa yang diperlukan atau dihasilkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.



Gambar 3.4. Relasi langsung pada Domain Proses Bisnis

B. Kerangka Kerja Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang dapat dipercaya. Dalam membangun tersedianya data dan informasi ini, pemetaan atas data dan informasi di lingkungan pemerintahan diperlukan sehingga pertanggungjawaban atas kualitas data dapat dilaksanakan dengan baik.

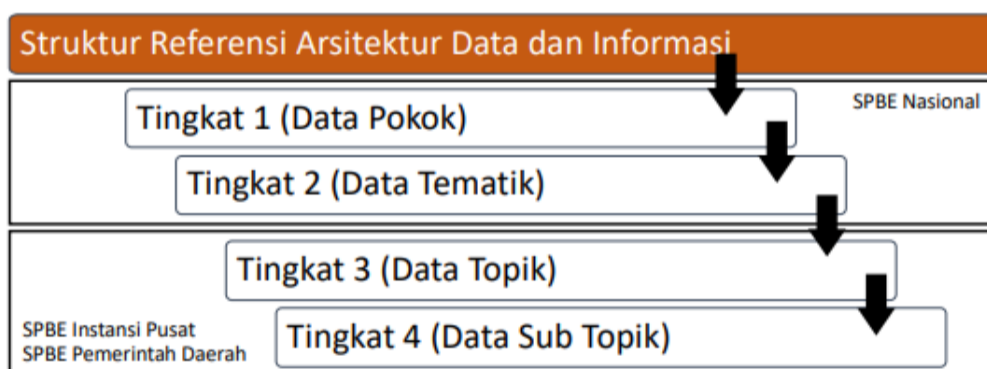
Domain arsitektur data dan informasi disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di pemerintahan yang sudah diklasifikasikan dalam referensi arsitektur data dan informasi. Domain arsitektur data dan informasi digunakan untuk mengetahui data apa saja yang digunakan dalam proses bisnis, ataupun layanan SPBE yang sifatnya berdiri sendiri, serta dengan prinsip yang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Satu Data Indonesia. Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain. Kerangka kerja dari arsitektur data dan informasi terdiri atas referensi arsitektur data dan informasi serta domain arsitektur data dan informasi.

1. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi



Dalam domain arsitektur data dan informasi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas dalam proses bisnis pemerintahan, selanjutnya diklasifikasikan substansi data dan informasi ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur data dan informasi yang terdiri dari 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. data pokok, yang mengelompokkan data ke dalam data yang dihasilkan pada sektor pemerintahan dan data pendukung umum sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. data tematik, yang menjelaskan urusan pemerintahan yang diemban oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang, dikelompokkan ke dalam data tematik urusan pemerintahan dan uraian data pendukung umum sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. data topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data tematik di tingkat nasional sebagai tingkat 3 (ketiga), Pemerintah Daerah mendefinisikan data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki dengan merelasikan ke tingkat nasional;
- d. data sub topik, yang menjelaskan lebih rinci dari data topik sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan dalam membangun layanan terintegrasi sebagai bagian dari layanan digital nasional, serta kebutuhan operasional aplikasi.



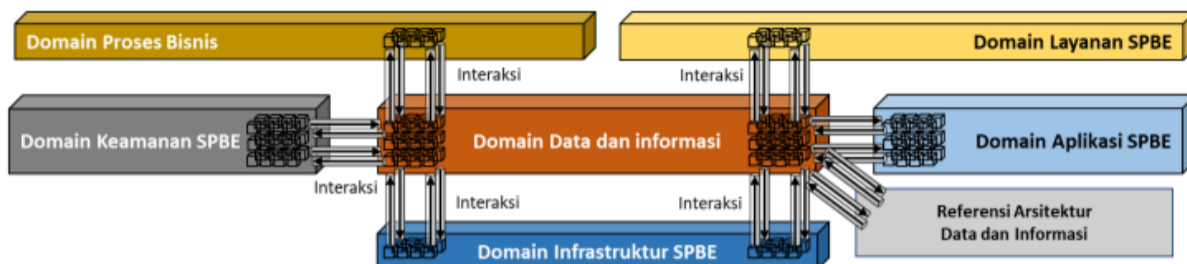
Gambar 3.5. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur data dan informasi mempunyai relasi langsung dengan domain arsitektur proses bisnis sebagai sumber data dan informasi tersebut dan domain arsitektur infrastruktur SPBE di mana



diklasifikasikan pada media penyimpan data tersebut. Semua data disimpan dalam infrastruktur SPBE yang terintegrasi. Data dan informasi harus dapat diakses dan dibagipakaikan melalui aplikasi SPBE sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Data dan informasi merupakan aset yang perlu diamankan dalam SPBE. Mekanisme pengamanan terhadap data diatur dan ditetapkan oleh standar arsitektur keamanan.



Gambar 3.6. Relasi langsung pada Domain Data dan Informasi

C. Kerangka Kerja Arsitektur Layanan SPBE

Dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE, dikatakan bahwa layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat. Sedangkan pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah dan Instansi Pusat, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan. Dapat dilihat bahwa layanan menggunakan asas manfaat yang dihasilkan (*benefits*) untuk para penggunanya.

Layanan SPBE merupakan luaran dari sebuah atau beberapa proses bisnis dan disajikan kepada pengguna dengan mencerminkan karakteristik layanan tertentu, serta diselaraskan dengan berbagai inisiatif strategis, program nasional, dan peraturan perundang-undangan terkait layanan pemerintah. Untuk itu domain layanan diklasifikasikan berdasarkan perspektif penerima manfaat. Dalam hal ini jika penerima manfaat tersebut adalah masyarakat seperti penerapan SPM dan dunia usaha seperti penerapan cipta kerja (eksternal dari pemerintahan) diklasifikasikan sebagai layanan publik (*Government to Citizen/G2C* dan *Government to Business/G2B*) dan bila penerima manfaat tersebut adalah instansi pemerintah ataupun aparatur negara (internal pemerintahan) maka diklasifikasikan sebagai layanan administrasi pemerintahan (*Government to Government/G2G*, *Government to Employee/G2E*).

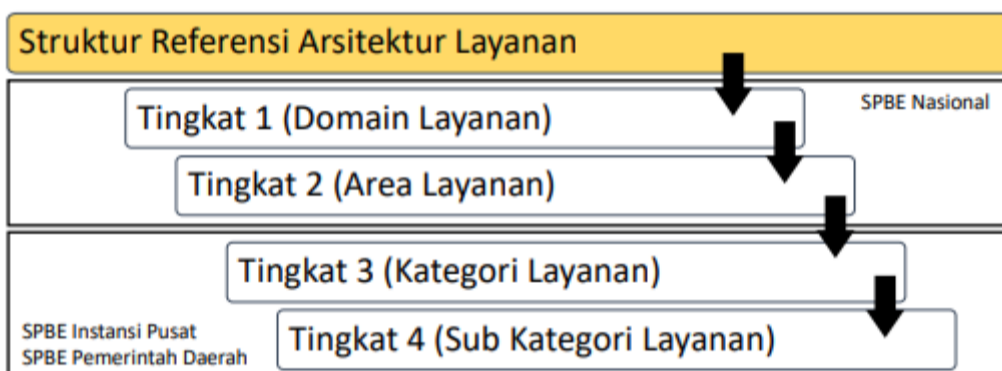
1. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

Dalam domain arsitektur layanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi layanan SPBE



ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur layanan SPBE yang berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. domain layanan, yang mengelompokkan layanan pemerintahan ke dalam domain layanan pemerintahan sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area layanan, yang menjelaskan area layanan pemerintah sesuai dengan target layanan, dikelompokkan ke dalam area layanan sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. kategori layanan, yang menjelaskan layanan pemerintah yang merupakan layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan
- d. sub kategori layanan, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori layanan sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.

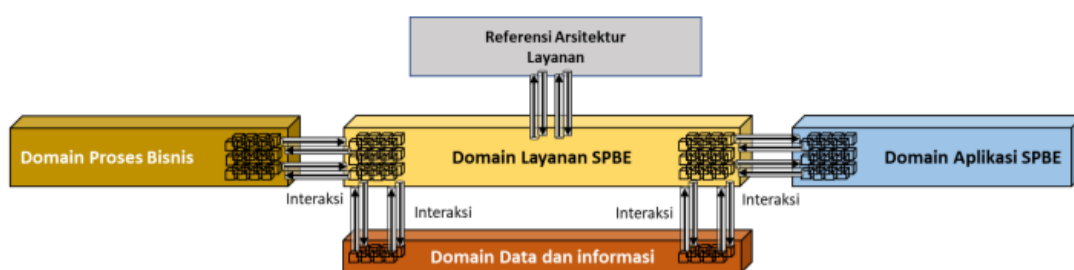


Gambar 3.7. Struktur Referensi Arsitektur Layanan SPBE

2. Keterkaitan Antar Domain

Dengan sekian banyak ragam layanan yang dihasilkan pemerintah, maka perlu dilakukan pengelompokan ataupun klasifikasi yang benar sesuai dengan struktur arsitektur layanan SPBE. Dengan adanya pengelompokan ini, memudahkan evaluasi terhadap layanan pemerintah yang didukung oleh sistem informasi secara keseluruhan yang berada pada domain aplikasi SPBE. Penghilangan duplikasi dalam penyediaan layanan yang ada antar unit kerja dalam Pemerintah Daerah, yang terbentuk dari domain proses bisnis, dilakukan dengan berbagi pakai aplikasi.





Gambar 3.8. Relasi langsung pada Domain Layanan SPBE

D. Kerangka Kerja Arsitektur Aplikasi SPBE

Arsitektur Aplikasi SPBE Nasional, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. pengembangan aplikasi, sesuai dengan amanat dalam Peraturan Presiden mengenai SPBE (keterpaduan, berbagi pakai, efisiensi, dan optimalisasi layanan);
- b. tujuan pembangunan dan layanan pemerintahan (undang-undang, peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri, dan regulasi lainnya serta disesuaikan dengan referensi arsitektur proses bisnis dan referensi arsitektur layanan); dan
- c. standardisasi (teknologi, lisensi, kode sumber terbuka, *delivery/proses*).

Dalam penyusunan regulasi ini, kerangka kerja arsitektur aplikasi SPBE yang akan dijelaskan yaitu referensi arsitektur aplikasi SPBE.

1. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

Dalam domain arsitektur aplikasi SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya diklasifikasikan substansi aplikasi SPBE ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur aplikasi SPBE berupa 4 (empat) tingkat, yaitu:

- a. domain aplikasi, yang mengelompokkan aplikasi pemerintah ke dalam 2 (dua) domain aplikasi pemerintah, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area aplikasi, yang menjelaskan area aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan, sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- c. kategori aplikasi, yang menjelaskan aplikasi pemerintah sesuai dengan target layanan spesifik yang hanya dimiliki oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan, dengan merelasikan kepada area layanan di tingkat nasional, sebagai tingkat 3 (ketiga); dan



- d. sub kategori aplikasi, yang menjelaskan lebih rinci dari kategori aplikasi sebagai tingkat 4 (keempat). Pemerintah Daerah menyusun struktur ini sesuai dengan kebutuhan dalam mendukung pembangunan layanan terintegrasi secara nasional.



Gambar 3.9. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi SPBE

2. Keterkaitan Antar Domain

Layanan SPBE yang dilakukan secara elektronik dihasilkan melalui sebuah aplikasi. Aplikasi SPBE diharapkan dapat mengakomodir fungsi-fungsi yang perlu dilakukan untuk menghasilkan layanan tersebut. Dengan demikian aplikasi ini dapat berupa sebuah aplikasi ataupun pengintegrasian dari beberapa aplikasi. Aplikasi SPBE terhubung secara terintegrasi secara lintas sektoral, sehingga pembangunannya diwajibkan mengikuti kaidah pembangunan aplikasi SPBE sehingga mempermudah tata kelola aplikasi di lingkungan pemerintahan secara nasional.

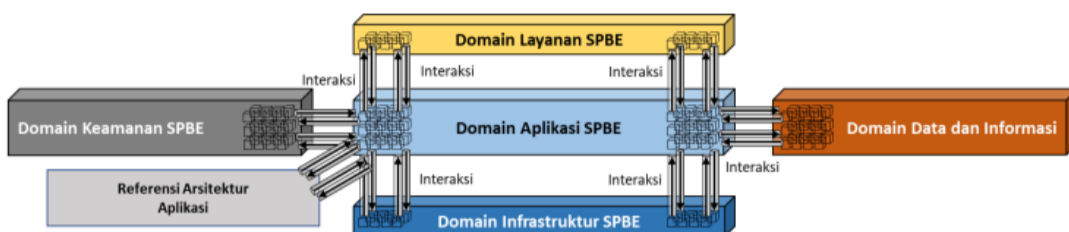
Penyusunan referensi arsitektur pada domain aplikasi SPBE bertujuan untuk melakukan klasifikasi aplikasi dan komponennya, melalui pemetaan aplikasi yang berkorelasi dengan arah kebijakan nasional berupa penciptaan layanan pemerintah terintegrasi, sehingga membantu secara signifikan dalam mengidentifikasi peluang ditemukannya duplikasi aplikasi dan peluang untuk berbagi pakai aplikasi.

Penyusunan referensi arsitektur aplikasi SPBE dilakukan dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. disusun berdasarkan pada struktur adaptif yang memungkinkan terjadinya pengembangan dan atau pengintegrasian fungsi lain/bam dalam penyediaan kemampuan teknologi informasi dan komunikasi;
- b. aplikasi yang berorientasi pada layanan;
- c. didefinisikan sebagai hirarki komponen aplikasi;



- d. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- e. berbasis kode sumber terbuka (*open source*); dan
- f. terkorelasi dengan domain layanan SPBE, dan domain data dan informasi melalui hubungan yang teridentifikasi dan didukung oleh domain infrastruktur SPBE dan domain keamanan SPBE.



Gambar 3.10. Relasi langsung pada Domain Aplikasi SPBE

E. Kerangka Kerja Arsitektur Infrastruktur SPBE

Arsitektur infrastruktur SPBE Pemda, memastikan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemda dilakukan secara berbagi pakai dan efisien, terhubung dengan infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:

- a. pusat komputasi dan data terpusat;
- b. kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
- c. penggunaan teknologi virtualisasi;
- d. pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi (*hardware/software/netware*) secara optimal;
- e. kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
- f. dukungan terkait media jaringan yang beragam;
- g. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai pemakai; dan
- h. kerangka infrastruktur dan aplikasi pemerintah.

Dalam penyusunan regulasi ini, kerangka kerja arsitektur infrastruktur SPBE yang akan dijelaskan yaitu referensi arsitektur infrastruktur SPBE.

1. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

Dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional. Substansi infrastruktur SPBE Pemda diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur infrastruktur SPBE berupa 3 (tiga) tingkat, yaitu:

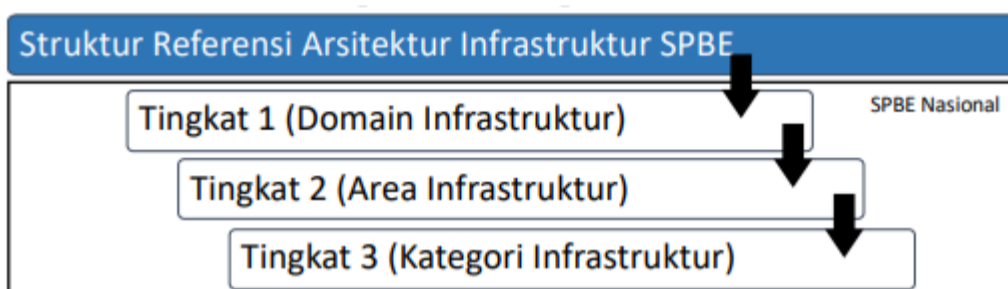
- a. domain infrastruktur, yang mengelompokkan infrastruktur ke dalam domain infrastruktur sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area infrastruktur, yang menjelaskan area infrastruktur sesuai dengan domain infrastruktur dalam mendukung pengelolaan



aplikasi serta data dan informasi, dikelompokkan ke dalam area infrastruktur sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional; dan

- c. kategori infrastruktur, yang menjelaskan lebih rinci dari area infrastruktur, sebagai tingkat 3 (ketiga), yang menjadi struktur di tingkat nasional.

Pemerintah Daerah memetakan kebutuhan infrastruktur dalam membangun dan mengelola aplikasi sesuai dengan domain arsitektur aplikasi SPBE serta memetakan data dan informasi sesuai dengan domain data dan informasi, sehingga dapat memantau dan mengevaluasi pemerataan infrastruktur SPBE nasional yang diperlukan.



Gambar 3.11. Struktur Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE

2. Keterkaitan Antar Domain

Domain infrastruktur SPBE akan memetakan semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya, yang digunakan untuk menghasilkan layanan.

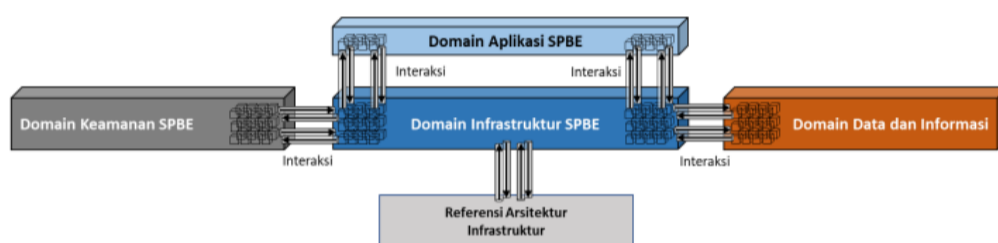
Penyusunan referensi arsitektur pada domain infrastruktur SPBE bertujuan untuk memberikan dasar dalam mengklasifikasikan teknologi infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan SPBE. Referensi ini digunakan sebagai acuan dalam pemetaan infrastruktur SPBE yang digunakan saat ini dan yang direncanakan ke dalam domain arsitektur infrastruktur SPBE. Informasi ini diperlukan dalam mengidentifikasi infrastruktur SPBE yang dapat digunakan secara berbagi pakai dan mempermudah dalam melakukan konsolidasi dan utilitasnya, agar infrastruktur SPBE dapat dipergunakan secara terpadu serta efektif dan efisien. Dalam hal ketersediaan ini belum tercapai, maka digunakan infrastruktur yang ada, yang dikoordinasikan dalam domain infrastruktur SPBE.



Penyusunan Referensi Arsitektur Infrastruktur SPBE dilakukan dengan memerhatikan faktor sebagai berikut:

- a. harus mudah beradaptasi dengan kebutuhan masa depan, dan mengakomodasi teknologi baru;
- b. didefinisikan sebagai hirarki elemen infrastruktur SPBE;
- c. dirancang untuk mempromosikan kemudahan penggunaan, aksesibilitas, dan pelaporan;
- d. memfasilitasi layanan dan interoperabilitas bersama;
- e. berbasis standar umum (*open standard*); dan
- f. dapat digunakan untuk mendukung domain aplikasi SPBE serta domain data dan informasi melalui hubungan yang terindikasi dan didukung oleh domain keamanan SPBE.

Referensi dari struktur pada domain infrastruktur SPBE berlaku secara nasional, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan bahasa yang sama dalam mendefinisikan infrastruktur SPBE yang dimiliki.



Gambar 3.12. Relasi langsung pada Domain Infrastruktur SPBE

F. Kerangka Kerja Arsitektur Keamanan SPBE

Domain arsitektur keamanan SPBE bertujuan untuk mendeskripsikan pengendalian dan pengintegrasian keamanan data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE yang terpadu dalam SPBE Pemda dan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dapat dilakukan pengendalian melalui identifikasi program keamanan, pertimbangan kelaikan keamanan serta regulasi keamanan yang komprehensif.

Keamanan mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*non-repudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya. Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi. Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi. Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital. Penerapan keamanan harus



memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan. Kerangka kerja arsitektur keamanan SPBE terdiri atas referensi arsitektur keamanan SPBE dan domain keamanan SPBE.

1. Struktur Arsitektur Keamanan SPBE

Dalam domain arsitektur keamanan SPBE yang akan mendukung arah kebijakan nasional, selanjutnya substansi keamanan SPBE diklasifikasikan ke dalam tingkatan struktur referensi arsitektur keamanan SPBE dengan 2 (dua) tingkat, yaitu:

- a. domain keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam domain keamanan terdiri dari standar keamanan, penerapan keamanan dan rekomendasi kelaikan keamanan, sebagai tingkat 1 (pertama), yang menjadi struktur di tingkat nasional;
- b. area keamanan, yang mengelompokkan keamanan SPBE ke dalam area keamanan terhadap data dan informasi, aplikasi SPBE, serta infrastruktur SPBE sebagai tingkat 2 (kedua), yang menjadi struktur di tingkat nasional.



Gambar 3.13. Struktur Referensi Arsitektur Keamanan SPBE

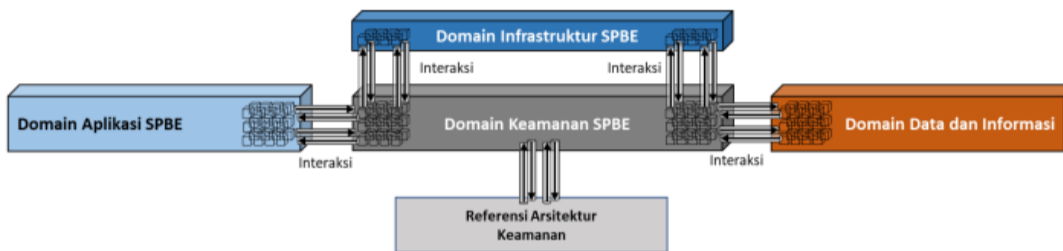
2. Keterkaitan Antar Domain

Domain arsitektur keamanan SPBE adalah domain arsitektur yang mendeskripsikan kerangka dasar keamanan terkait data dan informasi, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE untuk menghasilkan layanan pemerintah yang terintegrasi. Relasi domain arsitektur keamanan SPBE menyatakan hubungan dengan domain arsitektur data dan informasi, domain arsitektur aplikasi SPBE, dan domain arsitektur infrastruktur SPBE.

Tanggung jawab keamanan SPBE pada tingkat Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh unit kerja pelaksana SPBE di Pemerintah Daerah. Untuk penerapan keamanan SPBE, unit kerja pelaksana SPBE di Pemerintah Daerah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.



Domain arsitektur keamanan SPBE selanjutnya perlu didukung oleh pelaksanaan manajemen keamanan informasi SPBE, dimana manajemen dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Manajemen keamanan informasi dan teknis prosedur keamanan SPBE dilaksanakan berdasarkan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE yang ditetapkan.



Gambar 3.14. Relasi langsung pada Domain Keamanan SPBE



FE1526ABC7

BAB IV
REFERENSI ARSITEKTUR SPBE PEMERINTAH DAERAH

Arsitektur SPBE Pemda seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, diperlukan dalam melakukan penerapan SPBE untuk membentuk layanan digital pemerintah yang terintegrasi. Dalam upayanya penerapan arsitektur SPBE memerlukan komponen berupa referensi di tingkat nasional yang menjadi acuan oleh Pemerintah Daerah, dalam menyusun setiap domain arsitektur SPBE sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.

A. Referensi Arsitektur SPBE Pemda

1. Referensi Proses Bisnis

Referensi Proses Bisnis Pemda merupakan turunan dari referensi Proses Bisnis di tingkat nasional.

Tabel 4.1. Referensi Proses Bisnis Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Pertahanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hubungan luar negeri.
Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Industri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan industri.
02.02	Perdagangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perdagangan.
02.03	Pertanian	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanian.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.04	Perkebunan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perkebunan.
02.05	Peternakan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang peternakan.
02.06	Perikanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perikanan.
02.07	Badan Usaha Milik Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Investasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal.
02.09	Koperasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan koperasi.
02.10	Usaha Kecil dan Menengah	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Pariwisata	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kepariwisataan.
Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum.
03.02	Transmigrasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transmigrasi.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
03.03	Transportasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang transportasi.
03.04	Perumahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perumahan.
03.05	Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Pertanahan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertanahan.
03.07	Kependudukan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kependudukan.
Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Kesehatan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan.
04.02	Sosial	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sosial.
04.03	Pemberdayaan Perempuan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Hukum	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hukum.
05.02	Keamanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keamanan.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
05.03	Hak Asasi Manusia	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang hak asasi manusia.
Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Pendidikan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan.
06.02	Ketenagakerjaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ketenagakerjaan.
06.03	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Pemuda	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Olahraga	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keolahragaan.
Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Pertambangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pertambangan.
07.02	Energi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang energi.
07.03	Kehutanan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kehutanan.
07.04	Kelautan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kelautan.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
07.05	Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Agama	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang agama.
08.02	Kebudayaan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang kebudayaan.
Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Dalam Negeri	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang dalam negeri.
09.02	Keuangan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang keuangan negara.
09.03	Informasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang informasi.
09.04	Komunikasi	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang komunikasi.
09.05	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Aparatur Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Kesekretariatan Negara	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam bidang sekretariatan negara.



Selanjutnya dari Proses Bisnis yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berikut merupakan referensi yang digunakan berdasarkan hasil identifikasi.

Tabel 4.2. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Ekonomi dan Industri

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.02.08 Investasi		
RAB.02.08.01	Pembinaan Penanaman Modal Regional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan penanaman modal regional.
RAB.02.08.02	Manajemen Penanaman Modal	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang manajemen penanaman modal.
RAB.02.08.03	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang manajemen perizinan penanaman modal.
RAB.02.08.04	Litigasi Penanaman Modal	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang litigasi penanaman modal.
RAB.02.08.05	Pengelolaan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan informasi perizinan dan penanaman modal.

Tabel 4.3. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Pembangunan Kewilayahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.03.01 Pekerjaan Umum		



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.03.01.01	Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan pekerjaan.
RAB.03.01.02	Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
RAB.03.01.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan jasa konstruksi.
RAB.03.01.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan air limbah domestik.
RAB.03.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan sumber daya air.
RAB.03.03 Transportasi		
RAB.03.03.01	Pembinaan Transportasi Regional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan transportasi regional.
RAB.03.03.02	Pengelolaan Transportasi	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan transportasi regional.
RAB.03.03.03	Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan keamanan dan keselamatan transportasi.
RAB.03.03.04	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan sarana dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Transportasi	prasarana transportasi.
RAB.03.04 Perumahan		
RAB.03.04.02	Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Pemerintahan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan infrastruktur dan lingkungan pemerintahan.
RAB.03.04.03	Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengembangan kawasan permukiman.
RAB.03.04.04	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Strategis	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengembangan sarana dan prasarana strategis.
RAB.03.04.05	Penyelenggaraan Perumahan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.
RAB.03.06 Pertanian		
RAB.03.06.01	Pembinaan Pertanahan Regional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan pertanahan regional.
RAB.03.06.03	Kebijakan Pengadaan Tanah	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang kebijakan pengadaan tanah.
RAB.03.06.05	Litigasi Pertanahan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang litigasi pertanahan.
RAB.03.06.07	Tata Ruang	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang tata ruang.



Tabel 4.4. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Kesehatan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.04.01 Kesehatan		
RAB.04.01.01	Pembinaan Kesehatan Regional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan kesehatan regional.
RAB.04.01.02	Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang kefarmasian dan alat kesehatan.
RAB.04.01.03	Kesehatan Masyarakat	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang kesehatan masyarakat.
RAB.04.01.04	Pelayanan Kesehatan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pelayanan kesehatan.

Tabel 4.5. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Sosial

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.04.02 Sosial		
RAB.04.02.05	Penanganan Fakir Miskin	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang penanganan fakir miskin.

Tabel 4.6. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Hukum dan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.05.02 Keamanan		
RAB.05.02.01	Ketentraman,	Penyelenggaraan fungsi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Ketertiban Umum	pemerintahan dalam bidang ketenteraman, ketertiban umum.

Tabel 4.7. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Pendidikan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.06.01 Pendidikan		
RAB.06.01.02	Manajemen Tenaga Pendidikan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang manajemen tenaga pendidikan.
RAB.06.01.03	Pendidikan Khusus	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan khusus.
RAB.06.01.05	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pendidikan menengah.
RAB.06.01.09	Pembinaan Kepustakaan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pembinaan kepastakaan.
RAB.06.01.10	Pengelolaan Kepustakaan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan kepastakaan.

Tabel 4.8. Referensi Proses Bisnis Pemda Bidang Pemerintahan Umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.08.02 Kebudayaan		
RAB.08.02.09	Pengelolaan Kepustakaan	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pengelolaan kepastakaan.
RAB.09.01 Dalam Negeri		
RAB.09.01.02	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang kebijakan politik dan pemerintahan umum.
RAB.09.01.06	Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan daerah.
RAB.09.01.07	Keuangan Daerah	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang keuangan daerah.
RAB.09.02 Keuangan		
RAB.09.02.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang pengelolaan pendapatan daerah.
RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional		
RAB.09.05.01	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional.
RAB.09.06 Aparatur Negara		
RAB.09.06.02	Manajemen Aparatur Sipil Negara	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang manajemen aparatur sipil negara.
RAB.09.06.08	Kearsipan Nasional	Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam bidang kearsipan nasional.



2. Referensi Data dan Informasi

Domain data dan informasi, dimana memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 4.9. Referensi Data dan Informasi Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Informasi Pertahanan dan Luar Negeri (01)		
01.01	Data Pertahanan	Data yang merepresentasikan bidang pertahanan negara.
01.02	Data Hubungan Luar Negeri	Data yang merepresentasikan bidang hubungan luar negeri.
Informasi Ekonomi dan Industri (02)		
02.01	Data Industri	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan industri.
02.02	Data Perdagangan	Data yang merepresentasikan bidang perdagangan.
02.03	Data Pertanian	Data yang merepresentasikan bidang pertanian.
02.04	Data Perkebunan	Data yang merepresentasikan bidang perkebunan.
02.05	Data Peternakan	Data yang merepresentasikan bidang peternakan.
02.06	Data Perikanan	Data yang merepresentasikan bidang perikanan.
02.07	Data Badan Usaha Milik Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
02.08	Data Investasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan penanaman modal.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.09	Data Koperasi	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan koperasi.
02.10	Data Usaha Kecil dan Menengah	Data yang merepresentasikan bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
02.11	Data Pariwisata	Data yang merepresentasikan bidang kepariwisataan.
Informasi Pembangunan Kewilayahan (03)		
03.01	Data Pekerjaan Umum	Data yang merepresentasikan bidang pekerjaan umum.
03.02	Data Transmigrasi	Data yang merepresentasikan bidang transmigrasi.
03.03	Data Transportasi	Data yang merepresentasikan bidang transportasi.
03.04	Data Perumahan	Data yang merepresentasikan bidang perumahan.
03.05	Data Pembangunan Kawasan atau Daerah Tertinggal	Data yang merepresentasikan bidang pembangunan kawasan atau daerah tertinggal.
03.06	Data Pertanahan	Data yang merepresentasikan bidang pertanahan.
03.07	Data Kependudukan	Data yang merepresentasikan bidang kependudukan.
Informasi Perlindungan Sosial dan Kesehatan (04)		
04.01	Data Kesehatan	Data yang merepresentasikan bidang kesehatan.
04.02	Data Sosial	Data yang merepresentasikan bidang sosial.
04.03	Data	Data yang merepresentasikan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Pemberdayaan Perempuan	bidang pemberdayaan perempuan.
Informasi Ketertiban Umum dan Keselamatan (05)		
05.01	Data Hukum	Data yang merepresentasikan bidang hukum.
05.02	Data Keamanan	Data yang merepresentasikan bidang keamanan.
05.03	Data Hak Asasi Manusia	Data yang merepresentasikan bidang hak asasi manusia.
Informasi Pendidikan dan Tenaga Kerja (06)		
06.01	Data Pendidikan	Data yang merepresentasikan bidang pendidikan.
06.02	Data Ketenagakerjaan	Data yang merepresentasikan bidang ketenagakerjaan.
06.03	Data Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Data yang merepresentasikan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
06.04	Data Pemuda	Data yang merepresentasikan bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.
06.05	Data Olahraga	Data yang merepresentasikan bidang keolahragaan.
Informasi Lingkungan dan Sumber Daya Alam (07)		
07.01	Data Pertambangan	Data yang merepresentasikan bidang pertambangan.
07.02	Data Energi	Data yang merepresentasikan bidang energi.
07.03	Data Kehutanan	Data yang merepresentasikan bidang kehutanan.



FE1526ABC7

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
07.04	Data Kelautan	Data yang merepresentasikan bidang kelautan.
07.05	Data Lingkungan Hidup	Data yang merepresentasikan bidang lingkungan hidup.
Budaya dan Agama (08)		
08.01	Data Agama	Data yang merepresentasikan bidang agama.
08.02	Data Kebudayaan	Data yang merepresentasikan bidang kebudayaan.
Informasi Pemerintahan Umum (09)		
09.01	Data Dalam Negeri	Data yang merepresentasikan bidang dalam negeri.
09.02	Data Keuangan	Data yang merepresentasikan bidang keuangan negara.
09.03	Data Informasi	Data yang merepresentasikan bidang informasi.
09.04	Data Komunikasi	Data yang merepresentasikan bidang komunikasi.
09.05	Data Perencanaan Pembangunan Nasional	Data yang merepresentasikan bidang perencanaan pembangunan nasional.
09.06	Data Aparatur Negara	Data yang merepresentasikan bidang pengelolaan aparatur negara.
09.07	Data Kesekretariatan Negara	Data yang merepresentasikan bidang kesekretariatan negara.
Data Pendukung Umum (10)		
10.01	Data Kebijakan Pemerintah	Data yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pemerintah.
10.02	Data Manajemen Kegiatan	Data yang merepresentasikan informasi terkait manajemen kegiatan pemerintahan.
10.03	Data Kewilayahan	Data yang merepresentasikan informasi kewilayahan.
10.04	Data Dukung Lainnya	Data yang merepresentasikan informasi yang tidak tercakup dalam definisi lainnya.

Tabel 4.10. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Ekonomi dan Industri

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.02.08 Data Investasi		
RAD.02.08.02	Manajemen Penanaman Modal	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait manajemen penanaman modal.

Tabel 4.11. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Pembangunan Kewilayahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum		
RAD.03.01.01	Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pembinaan pekerjaan umum.
RAD.03.01.02	Pengelolaan Infrastruktur	Data topik yang merepresentasikan informasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Pekerjaan Umum	terkait pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
RAD.03.01.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pembinaan jasa konstruksi.
RAD.03.01.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pengelolaan air limbah domestik.
RAD.03.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pengelolaan sumber daya air.
RAD.03.06 Data Pertanahan		
RAD.03.06.04	Tata Ruang Tanah	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait tata ruang tanah.

Tabel 4.12. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Kesehatan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.01 Data Kesehatan		
RAD.04.01.01	Pembinaan Kesehatan Regional	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pembinaan kesehatan regional.
RAD.04.01.02	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait kefarmasian dan alat kesehatan.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.01.03	Kesehatan Masyarakat	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait kesehatan masyarakat.
RAD.04.01.04	Pelayanan Kesehatan	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pelayanan kesehatan.
RAD.04.01.05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit.

Tabel 4.13. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Sosial

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.02 Data Sosial		
RAD.04.02.05	Penanganan Fakir Miskin	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait penanganan fakir miskin.

Tabel 4.14. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Hukum dan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.05.02 Data Keamanan		
RAD.05.02.02	Pengayoman Masyarakat	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pengayoman masyarakat.

Tabel 4.15. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Pendidikan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.06.01 Data Pendidikan		
RAD.06.01.01	Pembinaan Pendidikan Regional	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pembinaan pendidikan regional.
RAD.06.01.04	Pendidikan Menengah	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pendidikan menengah.

Tabel 4.16. Referensi Data dan Informasi Pemda Bidang Pemerintahan Umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.09.01 Data Dalam Negeri		
RAD.09.01.02	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait kebijakan politik dan pemerintahan umum.
RAD.09.02 Data Keuangan		
RAD.09.02.02	Data Keuangan	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait data keuangan.
RAD.09.02.09	Pengelolaan Pajak	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pengelolaan pajak.
RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional		
RAD.09.05.01	Perencanaan Pembangunan Nasional	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait perencanaan.
RAD.09.06 Data Aparatur Negara		



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.09.06.01	Pengelolaan Aparatur Negara	Data topik yang merepresentasikan informasi terkait pengelolaan aparatur negara.

3. Referensi Layanan SPBE

Domain layanan memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 4.17. Referensi Layanan SPBE Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Layanan Publik (01)		
01.01	Pertahanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertahanan negara.
01.02	Hubungan Luar Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang hubungan luar negeri.
01.03	Kenegaraan	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kenegaraan.
01.04	Ekonomi	Kegiatan pelayanan dalam bidang perekonomian.
01.05	Industri	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan industri.
01.06	Perdagangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perdagangan.
01.07	Pertanian	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.08	Perkebunan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perkebunan.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.09	Peternakan	Kegiatan pelayanan dalam bidang peternakan.
01.10	Perikanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perikanan.
01.11	Badan Usaha Milik Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang pengelolaan badan usaha milik negara.
01.12	Investasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang penanaman modal.
01.13	Koperasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan koperasi.
01.14	Usaha Kecil dan Menengah	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembinaan usaha kecil dan menengah.
01.15	Pariwisata	Kegiatan pelayanan dalam bidang kepariwisataan.
01.16	Perizinan dan Akreditasi	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait perizinan dan akreditasi.
01.17	Pekerjaan Umum	Kegiatan pelayanan dalam bidang pekerjaan termasuk di dalamnya pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum.
01.18	Transmigrasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transmigrasi.
01.19	Transportasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang transportasi.
01.20	Perumahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang perumahan.
01.21	Pembangunan Kawasan atau	Kegiatan pelayanan dalam bidang pembangunan kawasan atau daerah



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Daerah Tertinggal	tertinggal.
01.22	Pertanahan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertanian.
01.23	Kependudukan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kependudukan.
01.24	Pemerintahan Daerah	Kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara umum.
01.25	Kesehatan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kesehatan.
01.26	Sosial	Kegiatan pelayanan dalam bidang sosial.
01.27	Pemberdayaan Perempuan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan perempuan.
01.28	Hukum	Kegiatan pelayanan dalam bidang hukum.
01.29	Keamanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keamanan.
01.30	Hak Asasi Manusia	Kegiatan pelayanan dalam bidang hak asasi manusia.
01.31	Pendidikan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pendidikan.
01.32	Ketenagakerjaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang ketenagakerjaan.
01.33	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	Kegiatan pelayanan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
01.34	Pemuda	Kegiatan pelayanan dalam bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
01.35	Olahraga	Kegiatan pelayanan dalam bidang keolahragaan.
01.36	Pertambangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang pertambangan.
01.37	Energi	Kegiatan pelayanan dalam bidang energi.
01.38	Kehutanan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kehutanan.
01.39	Kelautan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kelautan.
01.40	Lingkungan Hidup	Kegiatan pelayanan dalam bidang lingkungan hidup.
01.41	Agama	Kegiatan pelayanan dalam bidang agama.
01.42	Kebudayaan	Kegiatan pelayanan dalam bidang kebudayaan.
01.43	Informasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang informasi.
01.44	Komunikasi	Kegiatan pelayanan dalam bidang komunikasi.
Layanan Administrasi Pemerintahan (02)		
02.01	Dalam Negeri	Kegiatan pelayanan dalam bidang dalam negeri.
02.02	Keuangan	Kegiatan pelayanan dalam bidang keuangan negara.
02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Kegiatan pelayanan dalam bidang perencanaan dan pembangunan nasional.
02.04	Aparatur Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang aparatur negara.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
02.05	Kesekretariatan Negara	Kegiatan pelayanan dalam bidang sekretariatan negara.
02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang mendukung operasional organisasi/instansi.
02.07	Akuntabilitas Kinerja	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait akuntabilitas kinerja.
02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait kelembagaan dan tata kelola kelembagaan.
02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Kegiatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan data dan informasi pemerintahan.

Tabel 4.18. Referensi Layanan Pemda

Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE Pemda
RAL.01 Layanan Publik		
RAL.01.04	Ekonomi	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Ekonomi meliputi: a. RAL.01.04.06 Pajak dan Cukai
RAL.01.05	Industri	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Industri meliputi: a. RAL.01.05.09 Pengembangan Industri



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE Pemda
		Hijau
RAL.01.17	Pekerjaan Umum	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Pekerjaan Umum meliputi: a. RAL.01.17.01 Sarana Dan Prasarana Strategis
RAL.01.19	Transportasi	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Transportasi meliputi: a. RAL.01.19.02 Pelayanan Transportasi
RAL.01.20	Perumahan	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Perumahan meliputi: a. RAL.01.20.01 Infrastruktur Permukiman b. RAL.01.20.03 Perumahan Rakyat
RAL.01.24	Pemerintahan Daerah	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Pemerintahan Daerah meliputi: a. RAL.01.24.06 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
RAL.01.25	Kesehatan	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Kesehatan meliputi: a. RAL.01.25.01 Farmasi dan Alat Kesehatan b. RAL.01.25.02 Kesehatan Masyarakat c. RAL.01.25.03 Layanan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan d. RAL.01.25.06



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE Pemda
		Pengendalian Penyakit
RAL.01.26	Sosial	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Sosial meliputi: a. RAL.01.26.02 Penanganan Fakir Miskin b. RAL.01.26.03 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan c. RAL.01.26.04 Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
RAL.01.29	Keamanan	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Keamanan meliputi: a. RAL.01.29.06 Keamanan dan Ketertiban Umum
RAL.01.30	Hak Asasi Manusia	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Hak Asasi Manusia meliputi: a. RAL.01.30.02 Kepustakaan
RAL.01.31	Pendidikan	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Pendidikan meliputi: a. RAL.01.31.01 Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan b. RAL.01.31.04 Pendidikan Khusus c. RAL.01.31.05 Pendidikan Menengah d. RAL.01.31.09 Pengelolaan Kepustakaan
RAL.01.43	Informasi	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Informasi



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE Pemda
		meliputi: a. RAL.01.43.03 Pelayanan Informasi
RAL.02 Layanan Administrasi Pemerintahan		
RAL.02.02	Keuangan	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Keuangan meliputi: a. RAL.02.02.03 Perbendaharaan b. RAL.02.02.04 Penganggaran c. RAL.02.02.05 Pengelolaan Barang Milik Negara d. RAL.02.02.09 Pengelolaan Keuangan
RAL.02.03	Perencanaan Pembangunan Nasional	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi: a. RAL.02.03.03 Koordinasi Perencanaan
RAL.02.04	Aparatur Negara	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Aparatur Negara meliputi: a. RAL.02.04.01 Manajemen ASN b. RAL.02.04.02 Pembinaan Jabatan Fungsional c. RAL.02.04.03 Pendidikan dan Pelatihan Keahlian d. RAL.02.04.04 Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan e. RAL.02.04.08 Penyelenggaraan Pelayanan Publik



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE Pemda
		f. RAL.02.04.09 Manajemen Reformasi Birokrasi g. RAL.02.04.10 Pemetaan Potensi PNS h. RAL.02.04.11 Pengelolaan Arsip
RAL.02.06	Dukungan Operasional Organisasi	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Dukungan Operasional Organisasi meliputi: a. RAL.02.06.10 Sarana Dan Prasarana b. RAL.02.06.12 Dukungan Teknis Operasional c. RAL.02.06.18 Dukungan Kearsipan
RAL.02.08	Organisasi dan Tata Kelola	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Organisasi dan Tata Kelola meliputi: a. RAL.02.08.04 Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan
RAL.02.09	Data dan Informasi Pemerintahan	Identifikasi Kategori Layanan pada Area Layanan Data dan Informasi Pemerintahan meliputi: a. RAL.02.09.03 Pengelolaan Data dan Informasi

4. Referensi Aplikasi SPBE

Domain aplikasi SPBE memiliki struktur dengan 4 (empat) tingkat, dimana terdapat tingkat 1 (pertama) dan tingkat 2 (kedua) merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 4.19. Referensi Aplikasi SPBE Tingkat Nasional



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Aplikasi Umum (01)		
01.01	Aplikasi Layanan Publik	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan dipergunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung pelayanan publik.
01.02	Aplikasi Administrasi Pemerintahan	Aplikasi yang memiliki fungsi yang sama dan standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung administrasi pemerintahan.
Aplikasi Khusus (02)		
02.01	Aplikasi Misi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, untuk mendukung misi tertentu, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk misi khusus pada instansi pemerintahan tertentu.
02.02	Aplikasi Fungsi Tertentu	Aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi fungsi khusus yang bukan fungsi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah lain, dapat berupa aplikasi layanan publik dan/atau aplikasi administrasi pemerintahan untuk fungsi khusus pada instansi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		pemerintahan tertentu.

5. Referensi Infrastruktur SPBE

Domain infrastruktur SPBE memiliki struktur dengan 3 (tiga) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 4.20. Referensi Infrastruktur SPBE Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Fasilitas Komputasi (01)		
01.01	Pusat Data Nasional	Fasilitas yang digunakan keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data.
01.02	Pusat Komputasi	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pemrosesan komputasi tertentu atau penempatan sistem komputasi tertentu.
01.03	Pusat Kendali	Fasilitas yang digunakan untuk keperluan pengendalian dan pengoperasian dari sebuah lingkungan sistem.
Sistem Integrasi (02)		
02.01	Jaringan Intra Pemerintah	Jaringan tertutup yang menghubungkan antara subsistem atau simpul jaringan dalam satu sistem/organisasi.
02.02	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Sistem layanan komunikasi untuk interaksi antar aplikasi dalam pertukaran data maupun layanan.



Platform (03)		
03.01	Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi	Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan lingkungan kerja yang mendukung aplikasi.
03.02	Komputasi Awan	Lingkungan dengan virtualisasi sebagai layanan platform berdasarkan teknologi <i>cloud</i> untuk lingkungan kerja aplikasi.

6. Referensi Keamanan SPBE

Domain keamanan memiliki struktur dengan 2 (dua) tingkat, dimana keseluruhan tingkat merupakan struktur di tingkat nasional.

Tabel 4.21. Referensi Keamanan SPBE Tingkat Nasional

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
Standar Keamanan (01)		
01.01	Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE	Peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE dari lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
01.02	Standar Keamanan Internasional	Standar internasional yang digunakan sebagai pendukung dan untuk meningkatkan penerapan keamanan SPBE.
01.03	Regulasi lainnya	Peraturan Pemerintah lainnya yang dinilai masih relevan selain dari peraturan terkait standar teknis dan prosedur keamanan SPBE, yang saat ini menjadi acuan dalam penerapan keamanan SPBE.



Penerapan Keamanan (02)		
02.01	Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran keamanan SPBE.
02.02	Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengidentifikasi kerentanan dan risiko keamanan SPBE.
02.03	Peningkatan Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan keamanan SPBE.
02.04	Penanganan Insiden Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan mitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
02.05	Audit Keamanan SPBE	Bentuk kegiatan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi, memulihkan, dan mitigasi risiko insiden keamanan SPBE.
Kelaikan Keamanan (03)		
03.01	Kelaikan Keamanan Aplikasi SPBE	Kelaikan keamanan terhadap Aplikasi Umum dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar Aplikasi Umum yang telah mendapatkan rekomendasi



		kelaikan keamanan.
03.02	Kelaikan Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional	Kelaikan keamanan terhadap Infrastruktur SPBE nasional dilakukan melalui penilaian kerentanan secara mandiri di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan verifikasi di tingkat nasional. Output dari kegiatan ini adalah daftar infrastruktur SPBE nasional yang telah mendapatkan rekomendasi kelaikan keamanan.



BAB V

DOMAIN ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Domain Arsitektur SPBE yang dideskripsikan dalam bab ini merupakan substansi Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Substansi arsitektur tersebut memuat seluruh target pencapaian Arsitektur SPBE di keenam Domain Arsitektur SPBE.

A. Domain Arsitektur Proses Bisnis

Substansi arsitektur pada domain arsitektur proses bisnis, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional memuat:

1. proses bisnis bidang ekonomi dan industri;
2. proses bisnis bidang pembangunan kewilayahan;
3. proses bisnis bidang kesehatan;
4. proses bisnis bidang sosial;
5. proses bisnis bidang hukum dan keamanan;
6. proses bisnis bidang pendidikan; dan
7. proses bisnis bidang pemerintahan umum.

Tabel 5.1. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Industri

Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE
RAB.02.08 Investasi		
RAB.02.08.01	Pembinaan Penanaman Modal Regional	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Ekonomi dan Industri, Urusan Investasi, Fungsi Pembinaan Penanaman Modal Regional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal;</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE
		Penanaman Modal; dan c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
RAB.02.08.02	Manajemen Penanaman Modal	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Ekonomi dan Industri, Urusan Investasi, Fungsi Manajemen Penanaman Modal meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal; c. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi; d. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi; e. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi; dan f. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi.



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE
RAB.02.08.03	Manajemen Perizinan Penanaman Modal	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Ekonomi dan Industri, Urusan Investasi, Fungsi Manajemen Perizinan Penanaman Modal meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal; dan c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
RAB.02.08.04	Litigasi Penanaman Modal	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Ekonomi dan Industri, Urusan Investasi, Fungsi Litigasi Penanaman Modal meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non



Kode	Referensi Arsitektur	Identifikasi Arsitektur SPBE
		Perizinan.
RAB.02.08.05	Pengelolaan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Ekonomi dan Industri, Urusan Investasi, Fungsi Pengelolaan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.</p>

Tabel 5.2. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.03.01 Pekerjaan Umum		
RAB.03.01.01	Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pekerjaan Umum, Fungsi Pembinaan Pekerjaan Umum Regional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Arsitek.
RAB.03.01.02	Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pekerjaan Umum, Fungsi Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi; b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; c. Pengelolaan Leger Jalan; d. Survey Kondisi Jalan/Jembatan; e. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan; f. Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan; g. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan; h. Pembangunan Jalan;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		i. Rekonstruksi Jalan; j. Rehabilitasi Jalan; k. Pemeliharaan Berkala Jalan; l. Pemeliharaan Rutin Jalan; m. Pembangunan Jembatan; n. Penggantian Jembatan; o. Pelebaran Jembatan; p. Rehabilitasi Jembatan; q. Pelebaran Jalan Menuju Standar; dan r. Pemeliharaan Rutin Jembatan.
RAB.03.01.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pekerjaan Umum, Fungsi Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; b. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; c. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi; d. Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; e. Pengelolaan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi;</p> <p>f. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI;</p> <p>g. Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi; dan</p> <p>h. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi.</p>
RAB.03.01.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pekerjaan Umum, Fungsi Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;</p> <p>b. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat;</p> <p>c. Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan</p> <p>d. Pengembangan SDM</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik.
RAB.03.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pekerjaan Umum, Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM; b. Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM; c. Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan; d. Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota; e. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan; f. Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan; g. Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya; h. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya;</p> <p>i. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku;</p> <p>j. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai;</p> <p>k. Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya;</p> <p>l. Pembangunan Unit Air Baku;</p> <p>m. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya;</p> <p>n. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya;</p> <p>o. Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing;</p> <p>p. Normalisasi/Restorasi Sungai;</p> <p>q. Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		r. Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi; s. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi; t. Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi; u. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi; v. Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa; w. Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan; x. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan; y. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan; dan z. Operasional Unit Pengelola Irigasi.
RAB.03.03 Transportasi		
RAB.03.03.01	Pembinaan Transportasi Regional	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kewilayahan, Urusan Transportasi, Fungsi Pembinaan Transportasi Regional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi.</p>
RAB.03.03.02	Pengelolaan Transportasi	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Transportasi, Fungsi Pengelolaan Transportasi meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;</p> <p>b. Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi;</p> <p>c. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi;</p> <p>d. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi;</p> <p>e. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Provinsi;</p> <p>f. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin;</p> <p>g. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin;</p> <p>h. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin;</p> <p>i. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;</p> <p>j. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>k. Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi;</p> <p>l. Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi;</p> <p>m. Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi;</p> <p>n. Perumusan Kebijakan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi;</p> <p>o. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi;</p> <p>p. Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>q. Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p> <p>r. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>s. Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</p> <p>t. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas; dan</p> <p>u. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;</p>
RAB.03.03.03	Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Transportasi, Fungsi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Pengelolaan Keamanan Dan Keselamatan Transportasi meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor; b. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal; c. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan d. Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
RAB.03.03.04	Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Transportasi	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Transportasi, Fungsi Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Transportasi meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		b. Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional; dan c. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
RAB.03.04 Perumahan		
RAB.03.04.02	Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Pemerintahan	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Perumahan, Fungsi Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara.
RAB.03.04.03	Pengembangan Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Perumahan, Fungsi Pengembangan Kawasan Permukiman meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha;</p> <p>b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha; dan</p> <p>c. Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.</p>
RAB.03.04.04	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Strategis	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Perumahan, Fungsi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Strategis meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi; b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota; dan c. Penataan Bangunan dan Lingkungan.
RAB.03.04.05	Penyelenggaraan Perumahan	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Perumahan, Fungsi Penyelenggaraan Perumahan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi; b. Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Lokasi Relokasi Perumahan;</p> <p>c. Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani;</p> <p>d. Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana;</p> <p>e. Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi;</p> <p>f. Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus;</p> <p>g. Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana;</p> <p>h. Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator;</p> <p>i. Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana;</p> <p>j. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana;</p> <p>k. Penyusunan Site Plan dan/atau Detail</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>1. Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana;</p> <p>m. Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>n. Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi;</p> <p>o. Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>p. Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi;</p> <p>q. Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman;</p> <p>r. Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman;</p> <p>s. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman; dan t. Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha.
RAB.03.06 Pertanahan		
RAB.03.06.01	Pembinaan Pertanahan Regional	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pertanahan, Fungsi Pembinaan Pertanahan Regional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong; dan b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah.
RAB.03.06.03	Kebijakan Pengadaan Tanah	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pertanahan, Fungsi Kebijakan Pengadaan Tanah meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi; dan</p> <p>b. Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.</p>
RAB.03.06.05	Litigasi Pertanahan	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pertanahan, Fungsi Litigasi Pertanahan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.</p>
RAB.03.06.07	Tata Ruang	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Urusan Pertanahan, Fungsi Tata Ruang meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang;</p> <p>b. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang; c. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota; d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah; e. Sistem Informasi Penataan Ruang; f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang; g. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; dan h. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Tabel 5.3. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.04.01 Kesehatan		
RAB.04.01.01	Pembinaan Kesehatan Regional	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Kesehatan, Urusan Kesehatan, Fungsi



		<p>Pembinaan Kesehatan Regional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Rumah Sakit; Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan; Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan; Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
RAB.04.01.02	Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Kesehatan, Urusan Kesehatan, Fungsi Kefarmasian Dan Alat Kesehatan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK; dan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional.
RAB.04.01.03	Kesehatan Masyarakat	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Kesehatan, Urusan Kesehatan, Fungsi</p>



		<p>Kesehatan Masyarakat meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi; dan b. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.
RAB.04.01.04	Pelayanan Kesehatan	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Kesehatan, Urusan Kesehatan, Fungsi Pelayanan Kesehatan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana; b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB); c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak; d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif; e. Pengelolaan Pelayanan



		<p>Kesehatan Usia Lanjut;</p> <p>f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat;</p> <p>g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga;</p> <p>h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan;</p> <p>i. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan;</p> <p>j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya;</p> <p>k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji;</p> <p>l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK);</p> <p>m. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA;</p> <p>n. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus;</p> <p>o. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat;</p> <p>p. Penyusunan bahan kebijakan teknis pembiayaan dan jaminan kesehatan;</p> <p>q. Pelaksanaan pengelolaan dan fasilitas pembiayaan dan jaminan kesehatan;</p> <p>r. Terkelolanya jaminan kesehatan di tingkat</p>
--	--	---



		kab/kota; s. Terkelolanya jaminan kesehatan di tingkat provinsi; t. Evaluasi dan pelaporan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan; u. Operasional Pelayanan Rumah Sakit.
RAB.04.01.05	Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Kesehatan, Urusan Kesehatan, Fungsi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Surveilans dan Imunisasi.

Tabel 5.4. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Sosial

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.04.02 Sosial		
RAB.04.02.05	Penanganan Fakir Miskin	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Sosial, Urusan Penanganan Fakir Miskin, meliputi Fungsi sebagai berikut: a. Penanganan Korban Bencana; b. Rehabilitasi Sosial; c. Pemberdayaan Sosial; d. Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>e. Perlindungan dan Jaminan Sosial; dan</p> <p>f. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.</p> <p>Fungsi Penanganan Korban Bencana meliputi Sub Fungsi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi yang terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Penyediaan Permakanan;</p> <p>b. Penyediaan Sandang;</p> <p>c. Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi;</p> <p>d. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan; dan</p> <p>e. Pelayanan Dukungan Psikososial.</p> <p>Fungsi Rehabilitasi Sosial meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti;</p> <p>b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti;</p> <p>c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti; dan</p> <p>e. Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti.</p> <p>Fungsi Pemberdayaan Sosial meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi; dan</p> <p>b. Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi.</p> <p>Fungsi Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan meliputi Sub Fungsi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal yang terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:</p> <p>a. Fasilitasi Pemulangan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal.</p> <p>Fungsi Perlindungan dan Jaminan Sosial meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal; dan b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi. <p>Fungsi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan meliputi Sub Fungsi Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi yang terdiri dari Sub Kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi; b. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi; dan c. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi.



Tabel 5.5. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Hukum dan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.05.02 Keamanan		
RAB.05.02.01	Ketentraman, Ketertiban Umum	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Hukum dan Keamanan, Urusan Keamanan, Fungsi Ketentraman, Ketertiban Umum meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan; b. Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa; c. Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Provinsi;</p> <p>d. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum;</p> <p>e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;</p> <p>f. Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan;</p> <p>g. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum;</p> <p>h. Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;</p> <p>i. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada;</p> <p>j. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;</p> <p>k. Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Daerah dan Peraturan Gubernur; l. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; m. Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS; dan n. Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS.

Tabel 5.6. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.06.01 Pendidikan		
RAB.06.01.02	Manajemen Tenaga Pendidikan	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pendidikan, Urusan Pendidikan, Fungsi Manajemen Tenaga Pendidikan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus; dan</p> <p>b. Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus.</p>
RAB.06.01.03	Pendidikan Khusus	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pendidikan, Urusan Pendidikan Khusus, meliputi Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Pengelolaan Pendidikan Khusus.</p> <p>Fungsi Pengelolaan Pendidikan Khusus meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Pembangunan Ruang Laboratorium;</p> <p>b. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;</p> <p>c. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB);</p> <p>d. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa;</p> <p>e. Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah;</p> <p>f. Pengadaan Alat Rumah Tangga</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Sekolah; g. Pengadaan Alat Praktis dan Peraga Siswa; h. Pengadaan Mebel Sekolah; i. Pengadaan Perlengkapan Sekolah; j. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus; k. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus; l. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah; m. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; n. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus; dan o. Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah.
RAB.06.01.05	Pendidikan Menengah	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pendidikan, Urusan Pendidikan Menengah meliputi Fungsi sebagai berikut: a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas; dan b. Pengelolaan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>Fungsi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; b. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; d. Penambahan Ruang Kelas Baru; e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; f. Pengadaan Mebel Sekolah; g. Pengadaan Perlengkapan Sekolah; h. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas; i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas; j. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Atas;</p> <p>k. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik;</p> <p>l. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas;</p> <p>m. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (KCD 1-13);</p> <p>n. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah;</p> <p>o. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas;</p> <p>p. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah;</p> <p>q. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; dan</p> <p>r. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.</p> <p>Fungsi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan meliputi Sub Fungsi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; b. Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru); c. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; d. Penambahan Ruang Kelas Baru; e. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik; f. Pengadaan Mebel Sekolah; g. Pengadaan Perlengkapan Sekolah; h. Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan; i. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan; j. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan; k. Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik; l. Penyiapan dan Tindak Lanjut



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan; m. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah (KCD 1-13); n. Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah; o. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan; p. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah; q. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa; dan r. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan.

Tabel 5.7. Identifikasi Proses Bisnis Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan Umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAB.06.01 Pendidikan		
RAB.06.01.09	Pembinaan Kepustakaan	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Umum, Urusan Pendidikan, Fungsi Pembinaan Kepustakaan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembinaan Perpustakaan pada Perpustakaan Umum, Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, Perguruan Tinggi dan Perpustakaan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan; b. Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi; c. Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat; d. Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca; e. Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi; f. Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Karya Cetak Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; dan</p> <p>g. Pembentukan Dewan Perpustakaan.</p>
RAB.06.01.10	Pengelolaan Kepustakaan	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Pendidikan, Fungsi Pengelolaan Kepustakaan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <p>a. Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi;</p> <p>b. Pengembangan Perpustakaan Deposit;</p> <p>c. Pengelolaan dan Pengembangan/Penyediaan Bahan Pustaka;</p> <p>d. Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi;</p> <p>e. Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;</p> <p>f. Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		g. Penerbitan Katalog Induk Daerah; h. Penerbitan Bibliografi Daerah; i. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum; j. Penyelenggaraan Perpustakaan Deposit; dan k. Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus.
RAB.08.02 Kebudayaan		
RAB.08.02.09	Pengelolaan Kepustakaan	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Kebudayaan, Fungsi Pengelolaan Kepustakaan meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Pengembangan, Pengolahan dan Pengalih mediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan; dan b. Pengembangan dan Pengolahan Buku Langka dan Literatur Jawa Barat.
RAB.09.01 Dalam Negeri		
RAB.09.01.02	Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Hukum dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Keamanan, Urusan Dalam Negeri, Fungsi Kebijakan Politik dan Pemerintahan Umum meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyusunan Program Kerja bidang Kesatuan Bangsa dan Politik b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan; c. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah; d. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah;</p> <p>e. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah; dan</p> <p>f. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah.</p>
RAB.09.01.06	Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Dalam Negeri, Fungsi Pemerintahan dan Pembangunan Daerah meliputi Sub Fungsi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		sebagai berikut: a. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
RAB.09.01.07	Keuangan Daerah	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Dalam Negeri, Fungsi Keuangan Daerah meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS; b. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS; c. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD; d. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD; e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD; f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD; g. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>h. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD;</p> <p>i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran;</p> <p>j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan;</p> <p>k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah;</p> <p>l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan;</p> <p>m. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota;</p> <p>n. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>o. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;</p> <p>p. Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota;</p> <p>q. Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan;</p> <p>r. Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah;</p> <p>s. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD;</p> <p>t. Penatausahaan Pembiayaan Daerah;</p> <p>u. Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank;</p> <p>v. Koordinasi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFKI);</p> <p>w. Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait;</p> <p>x. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan;</p> <p>y. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban;</p> <p>z. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>dan Semesteran;</p> <p>aa. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>bb. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi;</p> <p>cc. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</p> <p>dd. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah;</p> <p>ee. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;</p> <p>ff. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah;</p> <p>gg. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;</p> <p>hh. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi;</p> <p>ii. Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah;</p> <p>jj. Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi;</p> <p>kk. Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah;</p> <p>ll. Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan;</p> <p>mm. Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;</p> <p>nn. Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi;</p> <p>oo. Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>pp. Penyusunan Standar Harga;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>qq. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;</p> <p>rr. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;</p> <p>ss. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>tt. Inventarisasi Barang Milik Daerah;</p> <p>uu. Pengamanan Barang Milik Daerah;</p> <p>vv. Penilaian Barang Milik Daerah;</p> <p>ww. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah;</p> <p>xx. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;</p> <p>yy. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;</p> <p>zz. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah; dan</p> <p>aaa. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Pemerintah Kabupaten/Kota.
RAB.09.02 Keuangan		
RAB.09.02.10	Pengelolaan Pendapatan Daerah	<p>Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Keuangan, Fungsi Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi Sub Fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; c. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; e. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; f. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; g. Penetapan Wajib Pajak Daerah; h. Pelayanan dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Konsultasi Pajak Daerah; i. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; j. Penagihan Pajak Daerah; k. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah; l. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah; m. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan n. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
RAB.09.05 Perencanaan Pembangunan Nasional		
RAB.09.05.01	Perencanaan Pembangunan Nasional	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Perencanaan Pembangunan Nasional, Fungsi Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Strategis</p> <p>Pembangunan Daerah;</p> <p>b. Koordinasi Penelaahan Dokumen</p> <p>Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya;</p> <p>c. Pelaksanaan Konsultasi Publik;</p> <p>d. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;</p> <p>e. Pelaksanaan Musrenbang Provinsi;</p> <p>f. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi;</p> <p>g. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;</p> <p>h. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>j. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi;</p> <p>k. Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;</p> <p>l. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>m. Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>n. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>o. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;</p> <p>p. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan</p> <p>q. Asistensi Penyusunan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah.
RAB.09.06 Aparatur Negara		
RAB.09.06.02	Manajemen Aparatur Sipil Negara	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Aparatur Negara, Fungsi Manajemen Aparatur Sipil Negara meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN; b. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN; c. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan calon ASN; d. Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN e. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN; f. Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian; g. Evaluasi Pemberhentian ASN; h. Fasilitasi Lembaga



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Profesi ASN; i. Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN; j. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian; k. Pengelolaan Data Kepegawaian; l. Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian; m. Pengelolaan Mutasi ASN; n. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN; o. Pengelolaan Promosi ASN; p. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN; q. Pengelolaan Assessment Center; r. Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN; s. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN; t. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat; u. Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN; v. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>w. Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional;</p> <p>x. Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional;</p> <p>y. Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN;</p> <p>z. Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Pejabat Fungsional;</p> <p>aa. Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN;</p> <p>bb. Pembinaan Jabatan Fungsional ASN;</p> <p>cc. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional;</p> <p>dd. Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional;</p> <p>ee. Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;</p> <p>ff. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;</p> <p>gg. Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;</p> <p>hh. Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Pegawai; ii. Melakukan Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai; jj. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur; kk. Pembinaan Disiplin ASN; ll. Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN; mm. Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai; nn. Evaluasi Disiplin ASN; oo. Pengelolaan Cuti ASN; dan pp. Pengelolaan Izin PNS mencalonkan dan menjadi Kepala Desa.
RAB.09.06.08	Kearsipan Nasional	Penyelenggaraan pemerintahan pada Bidang Pemerintahan Umum, Urusan Aparatur Negara, Fungsi Kearsipan Nasional meliputi Sub Fungsi sebagai berikut: a. Pengelolaan Arsip; b. Pembinaan Kearsipan; c. Pengolahan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi; dan d. Tugas tambahan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		arsiparis.

B. Domain Arsitektur Data dan Informasi

Substansi arsitektur pada domain arsitektur data dan informasi, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional memuat:

1. data dan informasi bidang ekonomi dan industri;
2. data dan informasi bidang pembangunan kewilayahan;
3. data dan informasi bidang kesehatan;
4. data dan informasi bidang sosial;
5. data dan informasi bidang hukum dan keamanan;
6. data dan informasi bidang pendidikan; dan
7. data dan informasi bidang pemerintahan umum.

Tabel 5.8. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Industri

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.02.08 Data Investasi		
RAD.02.08.02	Manajemen Penanaman Modal	Identifikasi data pada Bidang Ekonomi dan Industri, Data Tematik Data Investasi, Data Topik Pembinaan Penanaman Modal Regional meliputi Data Sub Topik sebagai berikut: a. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Berdasarkan Sektor Usaha; b. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Asal



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Negara;</p> <p>c. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Berdasarkan Sektor Usaha;</p> <p>d. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Hotel dan Restoran;</p> <p>e. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam;</p> <p>f. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>g. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Kehutanan;</p> <p>h. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Perdagangan dan Reparasi;</p> <p>i. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Peternakan;</p> <p>j. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>k. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi;</p> <p>l. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Perikanan;</p> <p>m. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki;</p> <p>n. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Kayu;</p> <p>o. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran;</p> <p>p. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Karet dan Plastik;</p> <p>q. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Pertambangan;</p> <p>r. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>s. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Kertas dan Percetakan;</p> <p>t. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Industri Kimia dan Farmasi; dan</p> <p>u. Data Realisasi Investasi Penanaman Modal Sektor Konstruksi.</p>

Tabel 5.9. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.03.01 Data Pekerjaan Umum		
RAD.03.01.01	Pembinaan Pekerjaan Umum Regional	<p>Identifikasi data pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Data Tematik Data Pekerjaan Umum, Data Topik Data Pembinaan Pekerjaan Umum Regional meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <p>a. Data Proyek Pembangunan; dan</p> <p>b. Data Apartemen Transit.</p>
RAD.03.01.02	Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan	Identifikasi data pada Bidang Pembangunan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Umum	<p>Kewilayahan, Data Tematik Data Pekerjaan Umum, Data Topik Pengelolaan Infrastruktur Pekerjaan Umum meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Paket Pekerjaan; b. Data Jaringan Jalan; c. Data Permohonan Pengujian; d. Data Permohonan Bantuan Keuangan; e. Data Kondisi Jalan; dan f. Data Perizinan.
RAD.03.01.03	Pembinaan Jasa Konstruksi	<p>Identifikasi data pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Data Tematik Data Pekerjaan Umum, Data Topik Pembinaan Jasa Konstruksi meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Jasa Konstruksi.
RAD.03.01.04	Pengelolaan Air Limbah Domestik	<p>Identifikasi data pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Data Tematik Data Pekerjaan Umum, Data Topik Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Cakupan Akses Sanitasi Layak; dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		b. Data cakupan penanganan persampahan.
RAD.03.01.05	Pengelolaan Sumber Daya Air	<p>Identifikasi data pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Data Tematik Data Pekerjaan Umum, Data Topik Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Data Cakupan Pelayanan Air Minum; b. Data luas genangan tertangani; c. Data Hidrologi; d. Data Inventarisasi Sungai; e. Data Identifikasi Situ, Embung, Waduk; f. Data Daerah Irigasi; g. Data Jumlah Panjang Pantai berdasarkan batas pantai; h. Data Volume Infrastruktur Jaringan Irigasi Berdasarkan Jenis Infrastruktur; i. Data Nama dan Luas Daerah Aliran Sungai (DAS) Berdasarkan Provinsi di Indonesia; j. Data Jumlah Ketersediaan air permukaan berdasarkan debit



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>andal;</p> <p>k. Data potensi ketersediaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai; dan</p> <p>l. Data kejadian bencana berdasarkan Kabupaten/Kota.</p>
RAD.03.06 Data Pertanahan		
RAD.03.06.04	Tata Ruang Tanah	<p>Identifikasi data pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Data Tematik Data Pertanahan, Data Topik Tata Ruang Tanah meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <p>a. Data Rencana Tata Ruang Wilayah; dan</p> <p>b. Data Tutupan Lahan.</p>

Tabel 5.10. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.01 Data Kesehatan		
RAD.04.01.01	Pembinaan Kesehatan Regional	<p>Identifikasi data pada Bidang Kesehatan, Data Tematik Data Kesehatan, Data Topik Pembinaan Kesehatan Regional meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <p>a. Pembinaan Kesehatan Regional;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>b. Data Tenaga Kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Kategori;</p> <p>c. Data Tenaga Teknis di Puskesmas Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>d. Data Tenaga Teknis di Rumah Sakit Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>e. Data Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>f. Data Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>g. Data Tenaga Kesehatan Lingkungan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>h. Data Tenaga Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Data Tenaga Kebidanan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>j. Data Tenaga Kesehatan Gizi Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>k. Data Dokter Gigi Spesialis Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>l. Data Tenaga Keperawatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>m. Data Tenaga Kefarmasian Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>n. Data Rumah Sehat Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>o. Data Desa atau Kelurahan Universal Child Immunization Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>p. Data Kejadian Luar Biasa Pada Desa/Kelurahan yang Ditangani <24 Jam Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>q. Data Fasilitas Kesehatan Berdasarkan Jenis;</p> <p>r. Data Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>s. Data Wanita Usia Subur Tidak Hamil Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>t. Data Wanita Usia Subur Tidak Hamil Penerima Imunisasi Td Berdasarkan Jenis Imunisasi;</p> <p>u. Data Wanita Usia Subur Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>v. Data Wanita Usia Subur Penerima Imunisasi Td Berdasarkan Jenis Imunisasi;</p> <p>w. Data Desa/Kelurahan Yang Mencapai Universal Child Immunization (UCI) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>x. Data Desa yang Memanfaatkan Dana Desa untuk Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>y. Alokasi Anggaran Kesehatan Sumber APBD Kabupaten/Kota Berdasarkan Jenis Anggaran Belanja;</p> <p>z. Alokasi Anggaran Kesehatan Sumber APBD</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kabupaten/Kota</p> <p>Berdasarkan Dana Alokasi Khusus (DAK);</p> <p>aa. Alokasi Anggaran Kesehatan Sumber APBD Provinsi Berdasarkan Jenis Anggaran Belanja;</p> <p>bb. Alokasi Anggaran Kesehatan Sumber APBN Berdasarkan Jenis Anggaran Belanja;</p> <p>cc. Alokasi Anggaran Kesehatan Sumber Pemerintah Lain Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>dd. Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kepemilikan dan Kategori;</p> <p>ee. Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Khusus Berdasarkan Kepemilikan;</p> <p>ff. Data Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Berdasarkan Kepemilikan;</p> <p>gg. Data Tenaga Kesehatan di Klinik Institusi Diknakes/Diklat Berdasarkan Kategori</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>dan Jenis Kelamin;</p> <p>hh. Data Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>ii. Data Tenaga Kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>jj. Data Tenaga Kesehatan di Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Berdasarkan Kategori dan Jenis Kelamin;</p> <p>kk. Data Tenaga Keperawatan di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ll. Data Tenaga Keperawatan di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>mm. Data Tenaga Kebidanan di Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>nn. Data Tenaga Kebidanan di Rumah Sakit Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>oo. Data Tenaga Kesehatan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Masyarakat di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>pp. Data Tenaga Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>qq. Data Tenaga Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>rr. Data Tenaga Kesehatan Lingkungan di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ss. Data Tenaga Kesehatan Gizi di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>tt. Data Tenaga Kesehatan Gizi di Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>uu. Data Tenaga Teknik Biomedika di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>vv. Data Tenaga Teknik Biomedika di Puskesmas</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ww. Data Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>xx. Data Klinik Pratama Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>yy. Data Sarana Kesehatan Pelayanan Gawat Darurat Level I Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>zz. Data Desa Siaga Berdasarkan Jenis Desa/Kelurahan Siaga;</p> <p>aaa. Data Desa yang Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bbb. Rasio Tenaga Kesehatan per 100.000 Penduduk Berdasarkan Kategori Tenaga Kesehatan;</p> <p>ccc. Rasio Puskesmas Terhadap Wilayah Administrasi dan Penduduk; dan</p> <p>ddd. Data Posyandu Aktif Berdasarkan Kabupaten/Kota.</p>
RAD.04.01.02	Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Identifikasi data pada Bidang Kesehatan, Data



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Tematik Data Kesehatan, Data Topik Kefarmasian dan Alat Kesehatan meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; b. Data Apotek Pelayanan Program Rujuk Balik (PRB) Berdasarkan Kabupaten/Kota; c. Data Apotek Berdasarkan Kabupaten/Kota; d. Data Toko Alat Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota; e. Data Toko Obat Berdasarkan Kabupaten/Kota; f. Data Sarana Produksi dan Distribusi Kefarmasian Berdasarkan Kategori; g. Data Sarana Produksi Alat Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota; h. Data Industri Farmasi Berdasarkan Kabupaten/Kota; i. Data Industri Obat Tradisional Berdasarkan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Kabupaten/Kota; j. Data Pedagang Besar Farmasi Berdasarkan Kabupaten/Kota; dan k. Data Usaha Kecil Obat Tradisional Berdasarkan Kabupaten/Kota.
RAD.04.01.03	Kesehatan Masyarakat	Identifikasi data pada Bidang Kesehatan, Data Tematik Data Kesehatan, Data Topik Kesehatan Masyarakat meliputi Data Sub Topik sebagai berikut: a. Data Balita yang Sudah Ditimbang Berdasarkan Kabupaten/Kota; b. Data Balita yang Sudah Ditimbang Berdasarkan Jenis Kelamin; c. Data Penduduk Berdasarkan Akses Air Minum Layak; d. Data Penduduk Berdasarkan Jenis Sanitasi Layak; e. Data Penduduk Obesitas Usia 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Jenis Kelamin; f. Data Penduduk Pengguna Jaminan Kesehatan Berdasarkan Jenis



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Jaminan Kesehatan;</p> <p>g. Data Penyelenggara Air Minum Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>h. Data Penyelenggara Air Minum yang Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>i. Data Peserta Keluarga Berencana (KB) Aktif Berdasarkan Metode KB;</p> <p>j. Data Balita Berdasarkan Kategori Balita Gizi Buruk;</p> <p>k. Data Tenaga Kesehatan Berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan;</p> <p>l. Data Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) Berdasarkan Kategori UKBM;</p> <p>m. Data Kematian Berdasarkan Jenis Kematian dan Jenis Kelamin;</p> <p>n. Data Kematian Berdasarkan Jenis dan Penyebab Kematian;</p> <p>o. Data Balita Pendek</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Dengan Indeks Tb/U Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>p. Data Balita Kurus Dengan Indeks Bb/Tb Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>q. Data Pelayanan Kesehatan Peserta Didik Kelas 1 SD/MI Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>r. Data Pelayanan Kesehatan Peserta Didik Kelas 7 SMP/MTS Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>s. Data Pelayanan Kesehatan Peserta Didik Kelas 10 SMA/MA Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>t. Data Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>u. Data Pelayanan Kesehatan Pada SMA/MA Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>v. Data Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Berdasarkan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Jenis Kelamin;</p> <p>w. Data Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Yang Berisiko Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>x. Data Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Yang Mendapat Skrining Kesehatan Sesuai Standar Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>y. Data Puskesmas Yang Melaksanakan Kelas Ibu Hamil Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>z. Data Puskesmas Yang Melaksanakan Orientasi P4K Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>aa. Data Puskesmas Yang Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Remaja Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bb. Data Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 1 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>cc. Data Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 7</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>dan 10 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>dd. Data Puskesmas Yang Melaksanakan Penjaringan Kesehatan Kelas 1, 7, dan 10 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ee. Data Perempuan Usia 30-50 Tahun Yang Memiliki Hasil Tes Iva Positif Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ff. Data Perempuan Usia 30-50 Tahun Yang Dicurigai Kanker Leher Rahim dan Payudara Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>gg. Data Perempuan Usia 30-50 Tahun Yang Memiliki Tumor/Benjolan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>hh. Data Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Bidan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ii. Data Desa yang Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>jj. Data Desa yang Stop Buang Air Besar</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Sembarangan (BABS) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>kk. Data Sarana Air Minum dengan Resiko Rendah dan Sedang Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ll. Data Sarana Air Minum yang Diambil Sampel untuk Pemeriksaan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>mm. Data Sarana Air Minum yang di Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>nn. Data Sarana Air Minum Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>oo. Jumlah Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat dari Hasil Pemeriksaan Sampel Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>pp. Data Sarana Air Minum dengan Resiko Rendah dan Sedang Hasil Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL)</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Berdasarkan Kabupaten/Kota; qq. Data Sarana Air Minum yang Diambil Sampel untuk Pemeriksaan Berdasarkan Kabupaten/Kota; rr. Data Sarana Air Minum yang di Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) Berdasarkan Kabupaten/Kota; ss. Data Sarana Air Minum yang Memenuhi Syarat dari Hasil Pemeriksaan Sampel Berdasarkan Kabupaten/Kota; tt. Data Tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Kategori Tempat Umum; uu. Data Tempat Pengelolaan Makanan Berdasarkan Kategori Sektor dan Status Higiene Sanitasi; vv. Data Tempat Pengelolaan Makanan Berdasarkan Kategori Sektor; ww. Data Tempat Pengelolaan Makanan Berdasarkan Kategori Sektor;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>xx. Data Tempat Umum Berdasarkan Kategori Tempat Umum;</p> <p>yy. Data Tempat Umum Memenuhi Syarat Kesehatan Berdasarkan Kategori Tempat Umum;</p> <p>zz. Data Ibu Hamil yang Mengidap Anemia Berdasarkan Kabupaten Kota;</p> <p>aaa. Data Kasus Acute Flaccid Paralysis (Non Polio) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bbb. Data Ibu Nifas yang Mendapatkan VIT A Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ccc. Data Kunjungan Ibu Nifas Berdasarkan Jenis Kunjungan;</p> <p>ddd. Data Puskesmas Berdasarkan Jaringan Puskesmas;</p> <p>eee. Data Puskesmas dan Jaringan Puskesmas Berdasarkan Kategori;</p> <p>fff. Data Puskesmas dengan Ketersediaan 80% Obat & Vaksin Esensial Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ggg. Data Posyandu Berdasarkan Strata;</p> <p>hhh. Data Posyandu</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Aktif Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>iii. Data Posyandu Berdasarkan Strata;</p> <p>jjj. Data Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>kkk. Data Puskesmas Berdasarkan Kategori Puskesmas;</p> <p>lll. Data Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>mmm. Data Pasangan Usia Subur (PUS) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>nnn. Data Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ooo. Data Perempuan Usia 30-50 Tahun Yang Melakukan Pemeriksaan Klinis Leher Rahim dan Payudara Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ppp. Data Penerima Jaminan Kesehatan Penduduk Berdasarkan Jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI);</p> <p>qqq. Data Penerima</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Jaminan Kesehatan Penduduk Berdasarkan Jenis Penerima Bantuan Iuran (PBI);</p> <p>rrr. Data Penerima Jaminan Kesehatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kepesertaan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI);</p> <p>sss. Data Penerima Jaminan Kesehatan Penduduk Berdasarkan Jenis Kepesertaan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI);</p> <p>ttt. Data Cakupan Puskesmas dengan Ketersediaan 80% Obat & Vaksin Esensial Berdasarkan Kabupaten/Kota; dan</p> <p>uuu. Data Balita Kurang Gizi dengan Indeks Bb/U Berdasarkan Kabupaten/Kota.</p>
RAD.04.01.04	Pelayanan Kesehatan	<p>Identifikasi data pada Bidang Kesehatan, Data Tematik Data Kesehatan, Data Topik Pelayanan Kesehatan meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <p>a. Data Unit Transfusi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Darah Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Data Laboratorium Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>c. Data Klinik Berdasarkan Kategori Klinik;</p> <p>d. Data Rumah Sakit Milik Swasta Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Data Rumah Sakit Milik Pemerintah Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>f. Data Pelayanan Gigi dan Mulut Berdasarkan Jenis Pelayanan;</p> <p>g. Data Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Subjek Pelayanan dan Jenis Kelamin;</p> <p>h. Data Penanganan Komplikasi Neonatal Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>i. Data Ibu Bersalin Berdasarkan Kegiatan Persalinan;</p> <p>j. Data Kunjungan Neonatal Berdasarkan Kunjungan;</p> <p>k. Data Ahli Teknologi Laboratorium di</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>1. Data Pelayanan Kesehatan Pada Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>m. Data Pelayanan Kesehatan Pada Balita Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>n. Data Balita Ditimbang Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>o. Data Pelayanan Kesehatan Pada SD/MI Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>p. Data Pelayanan Kesehatan Pada Ibu Hamil Berdasarkan Jenis Kunjungan;</p> <p>q. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Tumpatan Gigi Tetap Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>r. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pencabutan Gigi Tetap Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>s. Data Persalinan Pada Ibu Hamil Berdasarkan Kategori;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>t. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Kasus Dirujuk Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>u. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada SD/MI Dengan Sikat Gigi Massal Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>v. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Murid SD/MI Yang Diperiksa Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>w. Data Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Murid SD/MI Yang Mendapatkan Perawatan Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>x. Data Keterampilan Fisik di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>y. Data Keteknisian Medis di Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>z. Data Perkiraan Komplikasi Neonatal Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>aa. Data Lahir Hidup</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bb. Data Penanganan Komplikasi Neonatal Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>cc. Persentase Penanganan Komplikasi Neonatal Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>dd. Data Kematian Neonatal Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ee. Data Kematian Balita Berdasarkan Penyebab Kematian;</p> <p>ff. Data Kematian Neonatal Berdasarkan Penyebab Kematian;</p> <p>gg. Data Kematian Post Neonatal Berdasarkan Penyebab Kematian;</p> <p>hh. Data Bayi Baru Lahir telah Ditimbang Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ii. Data Bayi Baru Lahir telah Ditimbang Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>jj. Data Kunjungan Neonatal Berdasarkan Jenis Kunjungan;</p> <p>kk. Data Bayi Baru Lahir Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ll. Data Bayi Usia</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>dibawah 6 Bulan</p> <p>Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>mm. Data Kunjungan Balita Batuk Atau Kesukaran Bernapas Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>nn. Data Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>oo. Data Kelahiran Bayi Berdasarkan Status Kelahiran dan Jenis Kelamin;</p> <p>pp. Data Kunjungan Ibu Nifas Berdasarkan Jenis Kunjungan;</p> <p>qq. Data Ibu Nifas yang Mendapatkan VIT A Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>rr. Data Pelayanan Kesehatan Pada SMP/MTS Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ss. Data Keteknisian Medis di Fasilitas Kesehatan Puskesmas Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>tt. Data Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Berdasarkan Kategori;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>uu. Data Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya Berdasarkan Jenis Sarana;</p> <p>vv. Data Rumah Sakit Mempunyai Kemampuan Gawat Darurat (Gadar) Level 1 Berdasarkan Kategori Rumah Sakit;</p> <p>ww. Data Average Length of Stay (ALOS) Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>xx. Data Turn Over Interval (TOI) Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>yy. Data Bed Turn Over (BTO) Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit; Data Bed Occupation Rate (BOR) Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>zz. Data Hari Lama Dirawat di Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit; Data Hari Perawatan di Rumah Sakit Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>aaa. Data Gross Death Rate (GDR)</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>bbb. Data Net Death Rate (NDR) Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>ccc. Data Gross Death Rate (GDR) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ddd. Data Pasien Keluar (Hidup dan Mati) dari Rumah Sakit Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>eee. Data Pasien Keluar (Hidup dan Mati) Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>fff. Data Kematian Pasien Keluar Mati Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ggg. Data Kematian Pasien Keluar Mati >48 Jam Dirawat Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>hhh. Data Kematian Pasien Keluar Mati Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>iii. Data Kematian Pasien Keluar Mati >48 Jam Dirawat Berdasarkan Rumah Sakit;</p> <p>jjj. Data Kunjungan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut (Rumah Sakit) Berdasarkan Kategori Kunjungan;</p> <p>kkk. Data Kunjungan Pasien di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas) Berdasarkan Kategori Kunjungan;</p> <p>lll. Data Dokter Spesialis Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>mmm. Data Jumlah Dokter Gigi Berdasarkan Kabupaten/Kota ;</p> <p>nnn. Data Jumlah Dokter Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ooo. Data Ibu Bersalin Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ppp. Data Ibu Hamil Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>qqq. Data Kunjungan Ibu Hamil Berdasarkan Jenis Kunjungan;</p> <p>rrr. Data Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Zat Besi (FE3-90 Tablet) Berdasarkan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>sss. Data Rumah Sakit Khusus Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ttt. Data Rumah Sakit Umum Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>uuu. Data Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>vvv. Data Rumah Sakit (RS) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>www. Data Dokter Umum Berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan;</p> <p>xxx. Data Dokter Spesialis Berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan;</p> <p>yyy. Data Dokter Gigi Berdasarkan Sarana Pelayanan Kesehatan;</p> <p>zzz. Data Tempat Tidur di Puskesmas Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>aaaa. Data Rumah Sakit Berdasarkan Jenis dan Kelas;</p> <p>bbbb. Data Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Berdasarkan Kategori Tenaga</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kesehatan;</p> <p>cccc. Data Tenaga Kesehatan di Puskesmas yang Telah Sesuai Standar Berdasarkan Kategori Tenaga Kesehatan;</p> <p>dddd. Data Tenaga Kesehatan di Puskesmas Berdasarkan Kategori Tenaga Kesehatan; dan</p> <p>eeee. Data Sarana Pelayanan Kesehatan Dasar Lainnya Berdasarkan Kategori.</p>
RAD.04.01.05	Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit	<p>Identifikasi data pada Bidang Kesehatan, Data Tematik Data Kesehatan, Data Topik Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <p>a. Data Donor berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>b. Data Kasus Penyakit Berdasarkan Jenis Penyakit;</p> <p>c. Data Terduga Tuberkulosis Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>d. Data Kasus Tuberkulosis Pada Anak Berdasarkan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kabupaten/Kota;</p> <p>e. Data Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar dan Diobati Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>f. Data Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar dan Diobati Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>g. Data Kesembuhan Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>h. Data Pengobatan Lengkap Semua Kasus Tuberkulosis Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>i. Data Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Data Penderita Kronis Filariasis Berdasarkan Kategori Kasus dan Jenis Kelamin;</p> <p>k. Data Balita Batuk Atau Kesukaran Bernafas Yang Diberikan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Tatalaksana Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>1. Data Penemuan Kasus Batuk Bukan Pneumonia Pada Balita Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>m. Data Kasus AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>n. Data Kasus AIDS Berdasarkan Kelompok Umur;</p> <p>o. Data Kematian Akibat AIDS Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>p. Data Kematian Ibu Berdasarkan Kelompok Umur;</p> <p>q. Data Kematian Ibu Hamil Berdasarkan Kelompok Umur;</p> <p>r. Data Kematian Akibat AIDS Berdasarkan Kelompok Umur;</p> <p>s. Data Kasus Diare Yang Dilayani Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>t. Data Kasus Diare Pada Balita Yang Dilayani Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>u. Data Kasus Diare Yang Mendapat Oralit Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>v. Data Kasus Diare Pada Balita yang Mendapatkan Zinc Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>w. Data Kasus Baru Kusta Kering Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>x. Data Kasus Baru Kusta Basah Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>y. Data Kasus Penderita Kusta Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>z. Data Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 0 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>aa. Data Kasus Baru Kusta Cacat Tingkat 2 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bb. Data Penderita Kusta Anak Dibawah 15 Tahun Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>cc. Data Penderita Kusta Anak Dibawah 15 Tahun Dengan Cacat Tingkat 2 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>dd. Data Kasus Kusta Kering Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>ee. Data Kasus Kusta Basah Terdaftar Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ff. Data Penderita Kusta Basah Selesai Berobat (Release From Treatment) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>gg. Data Penderita Kusta Kering Selesai Berobat (Release From Treatment) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>hh. Data Kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) Berdasarkan Jenis Penyakit;</p> <p>ii. Data Kejadian Luar Biasa (KLB) di Desa/Kelurahan Yang Ditangani Dibawah 24 Jam Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>jj. Data Kesakitan Akibat Malaria Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>kk. Data Kematian Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ll. Data Penderita Kejadian Luar Biasa (KLB) Berdasarkan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Jenis Kelamin; mm. Data Kematian Bayi Berdasarkan Kategori Bayi; nn. Data Kasus Tuberkulosis Berdasarkan Jenis Kelamin; oo. Data Keberhasilan Pengobatan Semua Kasus Tuberkulosis Berdasarkan Jenis Kelamin; pp. Data Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) Berdasarkan Jenis Kelamin; qq. Data Kasus Meninggal Demam Berdarah Dengue (DBD) Berdasarkan Jenis Kelamin; rr. Data Penderita Diabetes Melitus Berdasarkan Kabupaten/Kota; ss. Data Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Berdasarkan Kabupaten/Kota; tt. Data Penderita Diabetes Melitus yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>uu. Data Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>vv. Data Balita yang Diimunisasi BCG Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ww. Data Balita yang Diimunisasi Diphtheria Paratyphus Tetanus (DPT) Berdasarkan/Kabupaten Kota;</p> <p>xx. Data Balita yang Diimunisasi Hepatitis B Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>yy. Data Balita Bergizi Kurang Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>zz. Data Balita yang Diimunisasi Polio Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>aaa. Data Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bbb. Data Bayi Bergizi Buruk Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ccc. Data Bayi Lahir Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ddd. Data Bayi yang</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Diimunisasi BCG Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>eee. Data Bayi yang Diimunisasi Diphtheria Paratyphus Tetanus (DPT3) dan Hepatitis (HB3) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>fff. Data Bayi yang Diimunisasi Hepatitis Bayi (0-7) Hari Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ggg. Data Bayi yang Diimunisasi Polio 4 Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>hhh. Data Kasus Penyakit Campak Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>iii. Data Kasus Penyakit AIDS Berdasarkan Kategori Kasus;</p> <p>jjj. Data Kasus Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>kkk. Data Kasus Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>lll. Data Kasus Penyakit Kusta Berdasarkan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kabupaten/Kota; mmm. Data Kasus Penyakit Pneumonia Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>nnn. Data Kasus Penyakit Tuberkulosis Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ooo. Data Kasus Penyakit Diare Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ppp. Data Kasus Penyakit Malaria Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>qqq. Data Kasus Diare Pada Balita yang Mendapat Oralit Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>rrr. Data Kasus Penyakit Tetanus Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>sss. Data Imunisasi BCG Pada Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ttt. Data Penemuan Kasus Pneumonia Pada Balita Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>uuu. Data Penemuan Kasus Pneumonia Berat Pada Balita</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>vvv. Data Balita (6-59 Bulan) yang Mendapatkan Vitamin A Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>www. Data Perkiraan Kasus Pneumonia Pada Balita Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>xxx. Data Imunisasi Hepatitis B0 (0-7 Hari) Pada Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>yyy. Data Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>zzz. Data Balita Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>aaaa. Data Bayi yang Diimunisasi Campak Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>bbbb. Data Net Death Rate (NDR) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>cccc. Data Penderita Hipertensi Berusia >= 15 Tahun Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>dddd. Data Penderita Hipertensi yang</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Mendapat Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>eeee. Data Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>ffff. Data Sasaran Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>gggg. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>hhhh. Data Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapat Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>iiii. Data Kasus HIV Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>jjjj. Data Kasus HIV Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>kkkk. Data Kasus HIV Berdasarkan Kelompok Umur;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>llll. Data Bayi Menerima Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>mmmm. Data Bayi Menerima Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>nnnn. Data Bayi Usia dibawah 6 Bulan Penerima ASI Eksklusif Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>oooo. Data Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif pada Bayi <6 Bulan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>pppp. Data Pemberi Pelayanan dan Jenis Kelamin;</p> <p>qqqq. Data Ibu Hamil Mendapatkan Tablet Zat Besi Berdasarkan Jenis Tablet;</p> <p>rrrr. Data Ibu Hamil yang Melakukan Imunisasi Tetanus Toxoid Berdasarkan Dosis Imunisasi;</p> <p>ssss. Data Ibu Hamil Penerima Imunisasi Td Berdasarkan Jenis Imunisasi;</p> <p>tttt. Data Wanita Usia</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Subur Penerima Imunisasi Td Berdasarkan Jenis Imunisasi; uuuu. Data Wanita Usia Subur Tidak Hamil Penerima Imunisasi Td Berdasarkan Jenis Imunisasi; vvvv. Data Penduduk Sasaran Pembangunan Kesehatan Berdasarkan Kelompok Umur; wwww. Data Penduduk Sasaran Pembangunan Kesehatan Berdasarkan Jenis Kelamin; xxxx. Data Ibu Hamil Penerima Imunisasi Td Berdasarkan Jenis Imunisasi; yyyy. Data Ibu Hamil Penerima Tablet Tambah Darah(TTD) Berdasarkan Kabupaten/Kota; zzzz. Data Ibu Hamil Penerima Tablet Tambah Darah (TTD) Berdasarkan Kabupaten/Kota; aaaaa. Data Imunisasi Dpt-Hb-Hib 3 Pada Bayi Berdasarkan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Jenis Kelamin; bbbb. Data Imunisasi Polio 4 Pada Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>cccc. Data Imunisasi Campak/Mr Pada Bayi Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>dddd. Data Imunisasi Lanjutan Dpt-Hb-Hib 4 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>eeee. Data Imunisasi Lanjutan Campak/Mr2 Pada Anak Usia Dibawah Dua Tahun (Baduta) Berdasarkan Jenis Kelamin;</p> <p>ffff. Data Pemberian Vitamin A Pada Bayi (6-11 Bulan) Berdasarkan Kabupaten/Kota; dan</p> <p>gggg. Data Pemberian Vitamin A Pada Anak Balita (12-59 Bulan) Berdasarkan Kabupaten/Kota.</p>

Tabel 5.11. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Sosial



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.02 Data Sosial		
RAD.04.02.05	Penanganan Fakir Miskin	<p>Identifikasi data pada Bidang Sosial, Data Tematik Data Sosial, Data Topik Penanganan Fakir Miskin meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data klien Pengemis; b. Data klien Gelandangan; c. Data Kabupaten/Kota; d. Data Fasilitas yang Diterima oleh klien; e. Data klien lanjut usia terlantar; f. Data klien anak terlantar; g. Data klien tuna sosial; h. Data klien penyandang disabilitas terlantar; i. Data KUBE (Kelompok Usaha Bersama); j. Data Realisasi Bansos KUBE; k. Data korban bencana; l. Data bantuan logistik; m. Data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang terdaftar; n. Data PSKS yang mengikuti bimtek;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.04.02 Data Sosial		
		o. Data Dunia Usaha; p. Data anak angkat; q. Data orang tua angkat; dan r. Data WN Migran korban tindak kekerasan tertangani.

Tabel 5.8. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Hukum dan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.05.02 Data Keamanan		
RAD.05.02.02	Pengayoman Masyarakat	Identifikasi data pada Bidang Hukum dan Keamanan, Data Tematik Data Dalam Negeri, Data Topik Pengayoman Masyarakat meliputi Data Sub Topik sebagai berikut: a. Data kegiatan pengamanan; b. Data kegiatan patroli; c. Data kegiatan pengawalan VVIP; d. Data kegiatan penanganan unjuk rasa; e. Data kegiatan deteksi dini; f. Data penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>pemanggilan, sidang di tempat dan/atau penyerahan berkas pelanggar kepada kejaksaan;</p> <p>g. Data tindakan administratif;</p> <p>h. Data kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan mendatangi langsung masyarakat, aparaturnya atau badan hukum dalam rangka mensosialisasikan Perda dan Pergub;</p> <p>i. Data anggota Linmas;</p> <p>j. Data kejadian bencana;</p> <p>k. Data perbantuan tibumtranmas;</p> <p>l. Data perbantuan pemilu;</p> <p>m. Data anggota Satpol PP se-Jawa Barat yang telah mendapatkan pelatihan;</p> <p>n. Data PPNS se-Jawa Barat yang telah mendapatkan pelatihan; dan</p> <p>o. Data perjanjian kerjasama daerah dalam pencegahan potensi gangguan ketentraman dan ketertiban umum.</p>



Tabel 5.13. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.06.01 Data Pendidikan		
RAD.06.01.01	Pembinaan Pendidikan Regional	<p>Identifikasi data pada Bidang Pendidikan, Data Tematik Data Pendidikan, Data Topik Pembinaan Pendidikan Regional meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Kepala Sekolah dan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); b. Data Penduduk Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Usia 16-18 Tahun; c. Data Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); d. Data Sekolah Menengah Atas (SMA); e. Data Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); f. Data Sekolah Luar Biasa (SLB); g. Data Murid Sekolah Menengah Atas(SMA); h. Data Murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMA); i. Data Murid Sekolah



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Luar Biasa (SLB);</p> <p>j. Data Guru Sekolah Menengah Atas (SMA);</p> <p>k. Data Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA);</p> <p>l. Data Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);</p> <p>m. Data Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);</p> <p>n. Data Guru Sekolah Luar Biasa (SLB);</p> <p>o. Data Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB);</p> <p>p. Data Buku Perpustakaan Deposit;</p> <p>q. Data Buku Perpustakaan Umum;</p> <p>r. Data Pengunjung Perpustakaan Umum;</p> <p>s. Data Peminjam Buku Perpustakaan Umum;</p> <p>t. Data Karya Cetak Karya Rekam yang Diserahkan;</p> <p>u. Data Buku Wakaf yang Diserahkan;</p> <p>v. Data Titik Lokasi Perpustakaan Keliling;</p> <p>w. Data Titik Lokasi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Kolecer;</p> <p>x. Data E-Book Perpustakaan Umum;</p> <p>y. Data Pengguna Sidebar;</p> <p>z. Data Naskah Masuk Sidebar;</p> <p>aa. Data Naskah Keluar Sidebar;</p> <p>bb. Data Disposisi Sidebar;</p> <p>cc. Data Nota Dinas Sidebar;</p> <p>dd. Data Keaktifan User Sidebar;</p> <p>ee. Data Drafting Sidebar;</p> <p>ff. Data Naskah yang Sudah Diberkaskan;</p> <p>gg. Data Pemusnahan Arsip Dibawah 10 Tahun;</p> <p>hh. Data Arsip yang Diselamatkan Akibat Bencana;</p> <p>ii. Data Arsip yang Diselamatkan Akibat Penggabungan, dan atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>jj. Data Pemindahan Naskah</p> <p>kk. Data Layanan Perbaikan Arsip;</p> <p>ll. Data Arsip Dinamis yang Dikelola;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>mm. Data Arsip Statis yang Dikelola;</p> <p>nn. Data Simpul Jaringan yang Dikelola;</p> <p>oo. Data Rekomendasi Arsip Statis yang Diautentikasi dan Hasil Alih Media;</p> <p>pp. Data Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang;</p> <p>qq. Data Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup;</p> <p>rr. Data Izin Penggunaan Arsip Bersifat Tertutup yang Diterbitkan dan Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi sesuai NSPK; dan</p> <p>ss. Data Perpustakaan yang menggunakan fasilitas bulk loan.</p>
RAD.06.01.04	Pendidikan Menengah	<p>Identifikasi data pada Bidang Pendidikan, Data Tematik Data Pendidikan, Data Topik Pendidikan Menengah meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <p>a. Data Pendidikan Menengah Atas;</p> <p>b. Data Pendidikan Menengah Kejuruan; dan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>c. Data Pendidikan Menengah Khusus.</p> <p>Sub Topik Data Pendidikan Menengah Atas meliputi:</p> <p>a. Data Siswa Putus Sekolah Menengah Atas;</p> <p>b. Data Siswa Lulus Sekolah Menengah Atas;</p> <p>c. Data Laboratorium IPA Sekolah Menengah Atas;</p> <p>d. Data Perpustakaan Sekolah Menengah Atas;</p> <p>e. Data Ruang Kelas Sekolah Menengah Atas;</p> <p>f. Data Toilet Guru Sekolah Menengah Atas;</p> <p>g. Data Toilet Siswa Sekolah Menengah Atas; dan</p> <p>h. Data Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah Menengah Atas.</p> <p>Sub Topik Data Pendidikan Menengah Kejuruan meliputi:</p> <p>a. Data Siswa Putus Sekolah Menengah Kejuruan;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>b. Data Siswa Lulus Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>c. Data Laboratorium IPA Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>d. Data Perpustakaan Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>e. Data Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>f. Data Toilet Guru Sekolah Menengah Kejuruan;</p> <p>g. Data Toilet Siswa Sekolah Menengah Kejuruan; dan</p> <p>h. Data Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah Menengah Kejuruan.</p> <p>Sub Topik Data Pendidikan Menengah Khusus meliputi:</p> <p>a. Data Siswa Putus Sekolah Menengah Khusus;</p> <p>b. Data Siswa Lulus Sekolah Menengah Khusus;</p> <p>c. Data Perpustakaan Sekolah Menengah Khusus;</p> <p>d. Data Ruang Kelas Sekolah Menengah Khusus;</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		e. Data Toilet Guru Sekolah Menengah Khusus; f. Data Toilet Siswa Sekolah Menengah Khusus; dan g. Data Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Sekolah Menengah Khusus.

Tabel 5.14. Identifikasi Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan Umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAD.09.01 Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum		
RAD.09.01.02	Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum	Identifikasi data pada Bidang Hukum dan Keamanan, Data Tematik Data Dalam Negeri, Data Topik Kebijakan Politik Dan Pemerintahan Umum meliputi Data Sub Topik sebagai berikut: a. Daftar 10 Partai Politik yang Mendapat Kursi di DPRD Provinsi; b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Berdasarkan Tahun; c. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Pendidikan Politik Berdasarkan Tahun;</p> <p>d. Jumlah Kegiatan Pembinaan Politik Berdasarkan Tahun;</p> <p>e. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan</p> <p>Pendahuluan Bela Negara (PPBN) Berdasarkan Tahun;</p> <p>f. Jumlah Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat (Ormas) Berdasarkan Tahun;</p> <p>g. Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Organisasi Kemasyarakatan dan Pemuda (OKP) Berdasarkan Tahun;</p> <p>h. Jumlah Orang Asing Berdasarkan Tahun;</p> <p>i. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>j. Jumlah Unjuk Rasa Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>k. Jumlah Potensi Konflik Berdasarkan Kabupaten/Kota;</p> <p>l. Jumlah Unjuk Rasa</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Berdasarkan Tahun; dan m. Data Ideologi.
RAD.09.02 Data Keuangan		
RAD.09.02.02	Keuangan Negara	<p>Identifikasi data pada Bidang Pemerintahan Umum, Data Tematik Data Keuangan, Data Topik Keuangan Negara meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Anggaran dan Realisasi Anggaran; b. Data Barang Milik Daerah; c. Jumlah Pendapatan Lain yang Sah; d. Laporan Realisasi Anggaran; e. Jumlah Pendapatan Dana Perimbangan; f. Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Berdasarkan Pembiayaan Daerah dan Kategori Pembiayaan; g. Jumlah Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Pendapatan Daerah dan Kategori Pendapatan; dan h. Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah Berdasarkan Pembiayaan Daerah



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		dan Kategori Pembiayaan.
RAD.09.02.09	Pengelolaan Pajak	<p>Identifikasi data pada Bidang Ekonomi dan Industri, Data Tematik Data Keuangan, Data Topik Data Pengelolaan Pajak meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan; b. Data Pengelolaan Pendapatan Daerah; c. Data Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan; dan d. Data Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan. <p>Data Sub Topik Data Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah; b. Data Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah; dan c. Data Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah.



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Data Sub Topik Data Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah; b. Data Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah; c. Data Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah; d. Data Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah; e. Data Penetapan Wajib Pajak Daerah; f. Data Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah; g. Data Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah; h. Data Penagihan Pajak Daerah; dan i. Data Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah. <p>Data Sub Topik Data Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan meliputi:</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>a. Data Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;</p> <p>b. Data Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah; dan</p> <p>c. Data Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah.</p> <p>Data Sub Topik Data Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan meliputi:</p> <p>a. Data Penyusunan dan Pengembangan Data Warehouse;</p> <p>b. Data Pengembangan Integrasi Sistem;</p> <p>c. Data Penyusunan dan Pengembangan Aplikasi Pendapatan; dan</p> <p>d. Data Pengembangan Infrastruktur Sistem Pendapatan.</p>
RAD.09.05 Data Perencanaan Pembangunan Nasional		
RAD.09.05.01	Perencanaan Pembangunan Nasional	Identifikasi data pada Bidang Pemerintahan Umum, Data Tematik Perencanaan Pembangunan Nasional, Data Topik Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi Data Sub Topik



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		sebagai berikut: a. Data Prioritas Pembangunan Nasional; b. Data Prioritas Pembangunan Provinsi; c. Data Kemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility); d. Data Sasaran Prioritas RKPD Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA); e. Data Sasaran Prioritas RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Provinsi; f. Data Sasaran Prioritas RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Provinsi; dan g. Data Nilai KPI (Key Performance Indicator) Berdasarkan Capaian Indikator Goals SDGs di Provinsi.
RAD.09.06 Data Aparatur Negara		
RAD.09.06.01	Pengelolaan Aparatur Negara	Identifikasi data pada Bidang Pemerintahan Umum, Data Tematik Data Aparatur Negara,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Data Topik Pengelolaan Aparatur Negara meliputi Data Sub Topik sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Data Anjab ABK; b. Data Jumlah kebutuhan pegawai; c. Data Pensiun; d. Data Kepegawaian; e. Data pegawai terkait layanan kepegawaian (karis/karsu); f. Data pegawai terkait layanan kepegawaian (karpeg); g. Data pegawai terkait layanan kepegawaian (taspen); h. Data kompetensi pegawai; i. Data Assessment pegawai; j. Data mutasi pegawai; k. Data promosi pegawai; l. Data nilai kinerja pegawai; m. Data penghargaan pegawai; dan n. Data Pelanggaran disiplin.

C. Domain Arsitektur Layanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain arsitektur layanan SPBE, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional memuat:

1. layanan bidang ekonomi dan industri;
2. layanan bidang pembangunan kewilayahan;
3. layanan bidang kesehatan;
4. layanan bidang sosial;



5. layanan bidang hukum dan keamanan;
6. layanan bidang pendidikan; dan
7. layanan bidang pemerintahan umum.

Tabel 5.15. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Industri

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.04 Ekonomi		
RAL.01.04.06	Pajak dan Cukai	Identifikasi layanan pada Bidang Ekonomi dan Industri, Area Layanan Ekonomi, Kategori Layanan Pajak dan Cukai meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan b. Layanan Pengelolaan Pendapatan Daerah c. Layanan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan d. Layanan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan
RAL.02.04 Aparatur Negara		
RAL.02.04.08	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Provinsi

Tabel 5.16. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
-------------	-----------------------------	---------------------------------------



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.05 Industri		
RAL.01.05.09	Pengembangan Industri Hijau	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas Kabupaten/Kota.
RAL.01.19 Transportasi		
RAL.01.19.02	Pelayanan Transportasi	Identifikasi layanan pada Bidang Hukum dan Keamanan, Area Layanan Transportasi, Kategori Layanan Pelayanan Transportasi meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Pelayanan Terminal Tipe B b. Layanan Perizinan Angkutan
RAL.01.17 Pekerjaan Umum		
RAL.01.17.01	Sarana Dan Prasarana Strategis	Identifikasi layanan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Area Layanan Pekerjaan umum, Kategori Layanan Sarana Dan Prasarana Strategis meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Rekomendasi Teknis Pembangunan Jalan b. Layanan Jasa



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Konstruksi</p> <p>c. Layanan Pembangunan Sarana Publik</p> <p>d. Layanan Pemeliharaan dan Pengoperasian Situ, Danau, Embung, dan Waduk (SDEW)</p> <p>e. Penanganan Kejadian Bencana akibat Daya Rusak Air</p> <p>f. Layanan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya</p> <p>g. Layanan Pembangunan Unit Air Baku</p> <p>h. Layanan Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya</p> <p>i. Layanan Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya</p> <p>j. Layanan Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing</p> <p>k. Layanan Normalisasi/Restorasi Sungai</p> <p>l. Layanan Pembangunan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Jaringan Irigasi Permukaan</p> <p>m. Layanan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</p> <p>n. Layanan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan</p> <p>o. Layanan Operasional Unit Pengelola Irigasi</p>
RAL.01.20.01	Infrastruktur Permukiman	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Area Layanan Pekerjaan umum, Kategori Layanan Infrastruktur Permukiman meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <p>a. Layanan Nyetor Sampah jadi Berkah (Nyepah)</p> <p>b. Pemenuhan Kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota</p>
RAL.01.20.03	Perumahan Rakyat	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Area Layanan Pekerjaan umum, Kategori Layanan Perumahan Rakyat meliputi Sub Kategori Layanan</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		sebagai berikut: a. Layanan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni b. Layanan Bantuan Perbaikan Rumah Korban Bencana c. Layanan Apartemen Transit d. Layanan Klinik Rumah e. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi
RAL.01.43 Informasi		
RAL.01.43.03	Pelayanan Informasi	Identifikasi layanan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Area Layanan Informasi, Kategori Layanan Pelayanan Informasi meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Data Paket Pekerjaan b. Layanan Rekomendasi Teknis Penggunaan Ruang Milik Jalan c. Layanan Data Kondisi jalan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		d. Layanan Bantuan Keuangan e. Layanan Uji Bahan Konstruksi f. Layanan Data Permohonan Informasi
RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi		
RAL.02.06.10	Sarana Dan Prasarana	Manajemen Proyek Pembangunan Fisik
RAL.02.06.12	Dukungan Teknis Operasional	Pembinaan layanan teknis urusan perumahan dan permukiman di kabupaten/kota
RAL.02.08 Organisasi dan Tata Kelola		
RAL.02.08.04	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Identifikasi layanan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Area Layanan Organisasi dan Tata Kelola, Kategori Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Penyediaan Rekomendasi Kebijakan Irigasi b. Layanan Permohonan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Izin Pengusahaan SDA



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		WS Kewenangan Provinsi c. Layanan Penyediaan Rekomendasi Kebijakan terkait Sungai, Danau, Waduk, dan Pantai
RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan		
RAL.02.09.03	Pengelolaan Data dan Informasi	Identifikasi layanan pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Area Data dan Informasi Pemerintahan, Kategori Layanan Pengelolaan Data dan Informasi meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi Jawa Barat b. Layanan Sistem Informasi Sumber Daya Air

Tabel 5.17. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.25 Kesehatan		
RAL.01.25.01	Farmasi dan Alat Kesehatan	Identifikasi layanan pada Bidang Kesehatan,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Area Layanan Kesehatan, Kategori Layanan Farmasi dan Alat Kesehatan meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penerbitan pengakuan pedagang besar farmasi (PBF) cabang dan cabang penyalur alat kesehatan (PAK) b. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (UKOT)
RAL.01.25.02	Kesehatan Masyarakat	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Kesehatan, Area Layanan Kesehatan, Kategori Layanan Kesehatan Masyarakat meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan kesehatan (Promotif, Preventif, Kuratif, Rehabilitatif) di Rumah Sakit b. Layanan Laboratorium c. Layanan Penerbitan Izin RS Kelas B d. Layanan Kesehatan tingkat daerah e. Layanan Pembiayaan Kesehatan f. Operasional Pelayanan Rumah



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Sakit
RAL.01.25.03	Layanan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan	Identifikasi layanan pada Bidang Kesehatan, Area Layanan Kesehatan, Kategori Layanan Pemberdayaan Tenaga Kesehatan meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Diklat SDM Nakes b. Layanan STR / SITTK
RAL.01.25.06	Pengendalian Penyakit	Identifikasi layanan pada Bidang Kesehatan, Area Layanan Kesehatan, Kategori Layanan Pengendalian Penyakit meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan pengendalian penyakit menular b. Layanan pengendalian penyakit tidak menular

Tabel 5.18. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Sosial

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.26 Sosial		



RAL.01.26.02	Penanganan Fakir Miskin	Identifikasi layanan pada Bidang Sosial, Area Layanan Sosial, Kategori Layanan Penanganan Fakir Miskin meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Penanganan Korban Bencana b. Pemberdayaan Sosial c. Rehabilitasi Sosial d. Perlindungan dan Jaminan Sosial
RAL.01.26.03	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Makam Pahlawan
RAL.01.26.04	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Tabel 5.19. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Hukum dan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.24 Pemerintahan Daerah		
RAL.01.24.06	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Identifikasi layanan pada Bidang Hukum dan Keamanan, Area Layanan Pemerintahan Daerah, Kategori Layanan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Penerbitan Surat Rekomendasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Penelitian b. Pencatatan Organisasi Kemasyarakatan c. Pendaftaran Partai Politik
RAL.01.29 Keamanan		
RAL.01.29.06	Keamanan dan Ketertiban Umum	Identifikasi layanan pada Bidang Hukum dan Keamanan, Area Layanan Keamanan, Kategori Layanan Keamanan dan Ketertiban Umum meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Laporan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan b. Layanan Laporan Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusakan Massa</p> <p>c. Layanan Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi</p> <p>d. Layanan Laporan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</p> <p>e. Layanan Laporan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia</p> <p>f. Layanan Laporan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan</p> <p>g. Layanan laporan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum</p> <p>h. Layanan Laporan Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat</p> <p>i. Layanan Laporan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada</p> <p>j. Layanan Laporan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>k. Layanan Laporan Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>l. Layanan Laporan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur</p> <p>m. Layanan Laporan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS</p> <p>n. Layanan Laporan Pemberkasan Administrasi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS
RAL.02.09 Data dan Informasi Pemerintahan		
DAL.02.09.03	Pengelolaan Data dan Informasi	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Hukum dan Keamanan, Area Layanan Data dan Informasi Pemerintahan, Kategori Layanan Pengelolaan Data dan Informasi meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Laporan Situasi dan Kondisi Daerah b. Fasilitasi Peningkatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan c. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik d. Fasilitasi Penguatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Masyarakat



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		e. Fasilitasi Kewaspadaan Daerah dan Penanganan Konflik Sosial

Tabel 5.20. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.31 Pendidikan		
RAL.01.31.01	Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Identifikasi layanan pada Bidang Pendidikan, Area Layanan Pendidikan, Kategori Layanan Manajemen Pendidik Dan Tenaga Kependidikan meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan ijin memimpin bagi Kepala Sekolah Swasta Jenjang SMA/SMK/SLB b. Fasilitasi Rekomendasi/nota Pertimbangan c. Fasilitasi Rekomendasi/nota Pertimbangan PLT Kepala Sekolah d. Fasilitasi Rekomendasi/nota Pertimbangan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Mutasi</p> <p>e. Fasilitasi Rekomendasi/nota Pertimbangan PTK baru</p> <p>f. Fasilitasi Pengurusan Nomor Registrasi Guru (NRG)</p>
RAL.01.31.04	Pendidikan Khusus	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pendidikan, Area Layanan Pendidikan, Kategori Layanan Pendidikan Khusus meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <p>a. Mutasi Siswa</p> <p>b. Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan/atau Penerbitan NPSN</p> <p>c. Fasilitasi alih Status dari SLB Swasta menjadi SLB Negeri</p>
RAL.01.31.05	Pendidikan Menengah	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pendidikan, Area Layanan Pendidikan, Kategori Layanan Pendidikan Menengah meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <p>a. Data dan Informasi</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Publik b. Mutasi Siswa c. Legalisir Ijazah SMA d. Penerimaan Peserta Didik Baru e. Beasiswa Prestasi Akademik Masuk Perguruan Tinggi f. Beasiswa Prestasi Non Akademik Masuk Perguruan Tinggi g. Izin Penambahan dan/atau Penutupan Kompetensi Keahlian Baru SMK h. Fasilitasi Publikasi melalui Radio i. Fasilitasi Kegiatan Livestreaming j. Fasilitasi Tempat Studio Multimedia k. Peminjaman Aula l. Pendirian Unit Sekolah Baru (USB) dan/atau Penerbitan NPSN

Tabel 5.21. Identifikasi Layanan Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan Umum

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.01.30 Hak Asasi Manusia		
RAL.01.30.02	Kepustakaan	Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Area Layanan Hak Asasi Manusia, Kategori Layanan Hak Asasi Manusia meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <p>a. Layanan Perpustakaan</p> <p>b. Layanan Akreditasi Perpustakaan</p>
RAL.01.31 Pendidikan		
RAL.01.31.09	Pengelolaan Kepustakaan	Layanan Perpustakaan Terpadu
RAL.02.02 Keuangan		
RAL.02.02.03	Perbendaharaan	Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
RAL.02.02.04	Penganggaran	Evaluasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota
RAL.02.02.05	Pengelolaan Barang Milik Negara	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Keuangan, Kategori Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <p>a. Izin Pembongkaran Barang Milik Daerah</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		b. Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah
RAL.02.02.09	Pengelolaan Keuangan	Evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (P2ABPD) Kabupaten/Kota
RAL.02.03 Perencanaan Pembangunan Nasional		
RAL.02.03.03	Koordinasi Perencanaan	Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kategori Layanan Koordinasi Perencanaan meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Layanan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan b. Layanan Data dan Informasi Publik c. Layanan Helpdesk SIPD d. CSR (Corporate Social Responsibility)
RAL.02.04 Aparatur Negara		
RAL.02.04.01	Manajemen ASN	Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Area Layanan Aparatur Negara, Kategori Layanan Manajemen ASN meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Layanan Pengadaan ASN b. Layanan Administrasi Pemberhentian ASN c. Layanan Fasilitas Lembaga Profesi ASN d. Layanan pengelolaan SIMPEG e. Layanan pengelolaan data kepegawaian f. Layanan rekonsiliasi data g. Layanan mutasi pegawai h. Layanan kenaikan pangkat ASN i. Layanan promosi ASN j. Layanan penghargaan pegawai k. Layanan pembinaan disiplin pegawai l. Layanan Proses Izin Perceraian Pegawai m. Layanan Pengelolaan Cuti ASN n. Layanan Izin PNS mencalonkan dan menjadi Kepala Desa
RAL.02.04.02	Pembinaan Jabatan	Identifikasi layanan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Fungsional	<p>pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Aparatur Negara, Kategori Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Sertifikasi Jabatan ASN b. Layanan Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional c. Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN d. Layanan Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
RAL.02.04.03	Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Aparatur Negara, Kategori Layanan Pendidikan Dan Pelatihan Keahlian meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN b. Layanan Pengembangan kompetensi jabatan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAL.02.04.04	Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan	Layanan Pelatihan Struktural
RAL.02.04.09.	Manajemen Reformasi Birokrasi	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Aparatur Negara, Kategori Layanan Manajemen Reformasi Birokrasi meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Layanan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur b. Layanan evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur
RAL.02.04.10.	Pemetaan Potensi PNS	Layanan Assessment Center
RAL.02.04.11	Pengelolaan Arsip	<p>Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Aparatur Negara, Kategori Layanan Pengelolaan Arsip meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Arsip Statis b. Pengelolaan Arsip Dinamis c. Pengelolaan Arsip



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Vital d. Pelayanan Peminjaman dan Penduplikasian Arsip Inaktif dan Arsip Vital e. Pembinaan f. Penyediaan Sarana dan Prasarana
RAL.02.06 Dukungan Operasional Organisasi		
RAL.02.06.18	Dukungan Kearsipan	Identifikasi layanan pada Bidang Pemerintahan Umum, Area Layanan Aparatur Negara, Kategori Layanan Dukungan Kearsipan meliputi Sub Kategori Layanan sebagai berikut: a. Pembinaan Kearsipan b. Pengolahan dan Penyajian Arsip menjadi Informasi c. Pelayanan Saksi Ahli Kearsipan d. Penilaian Angka Kredit Arsiparis

D. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE

Substansi arsitektur pada domain arsitektur aplikasi SPBE, sesuai dengan kebijakan pembangunan SPBE nasional memuat:

1. aplikasi bidang ekonomi dan industri;
2. aplikasi bidang pembangunan kewilayahan;
3. aplikasi bidang kesehatan;
4. aplikasi bidang sosial;
5. aplikasi bidang hukum dan keamanan;
6. aplikasi bidang pendidikan; dan



7. aplikasi bidang pemerintahan umum.

Tabel 5.22. Identifikasi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Ekonomi dan Industri

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.01 Aplikasi Umum		
RAA.01.01	Aplikasi Umum Layanan Publik	Identifikasi aplikasi pada Bidang Ekonomi dan Industri, Domain Aplikasi Umum, Area Aplikasi Umum Layanan Publik meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Online Back Office (Jelita); b. Pengaduan Masyarakat; c. Perizinan Online Masyarakat (Web Based); d. Perizinan Online Masyarakat (Mobile Based).
RAA.02 Aplikasi Khusus		
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Ekonomi dan Industri, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Aplikasi penghubung WJIS (https://wjis.jabarpr



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>ov.go.id);</p> <p>b. Website West Java Investment Summit (https://investmenthub.jabarprov.go.id);</p> <p>c. Website West Java Investment Partnership (https://investasi.jabarprov.go.id);</p> <p>d. Website resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>e. No Limit Care (Call Center);</p> <p>f. Konversi Naskah Izin;</p> <p>g. Pandaraisa (e-TaNam Modal Ya);</p> <p>h. Aplikasi CRM ;</p> <p>i. API simpatik;</p> <p>j. MPP Digital (https://mppdigital.jabarprov.go.id);</p> <p>k. Aplikasi Telusur Objek dan Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (Atos Pamor);</p> <p>l. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE);</p> <p>m. Pemetaan Sebaran Data Berbasis Online (Pesta Online);</p> <p>n. Samsat Mobile Jawa</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Barat / Sambara (Mobile Based) o. Samsat Mobile Jawa Barat / Sambara (Web Based) p. Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor) q. Sistem Pajak Kendaraan Terintegrasi (Sakti); r. New Sambara; s. Sistem Pendapatan Terpadu (Sipandu); t. BAPENDA Executive Smart Monitoring (Bestrong); dan u. Sistem Informasi Geografis SAMSAT (SingSat).

Tabel 5.23. Identifikasi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Pembangunan Kewilayahan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.02 Aplikasi Khusus		
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Website Resmi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang; b. Website resmi Dinas Perumahan dan Permukiman; c. Aplikasi Manajemen Proyek SIDAWALA; d. Aplikasi WebGIS Penataan Ruang (https://wargi.jabarprov.go.id/); e. Website Masjid Raya Al-Jabbar; f. https://tj.temanjabar.net/; g. Klinik Rumah; h. Apartemen Transit (https://p3jb.jabarpov.go.id/); i. Sistem Informasi SDA (SISDA); j. Aplikasi percepatan perhitungan dan pengiriman data nilai perolehan air permukaan (E-LeNPA); k. <i>Early Warning System</i> Curah Hujan (ARMOS); l. Website resmi Dinas Perhubungan; m. Sistem Informasi Manajemen Dishub Jabar;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		n. SPION Jabar; o. CCTV Dishub Jabar; p. Sistem Pemantauan dan Analisa Objek Lalu Lintas (SiPANON); dan q. Sistem Informasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Jawa Barat (Simanis).
RAA.02.02	Aplikasi Khusus Misi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Pembangunan Kewilayahan, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Misi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: a. Aplikasi Monitoring Bantuan Keuangan (AMOB).

Tabel 5.24. Identifikasi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Kesehatan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.01 Aplikasi Umum		
RAA.01.01	Aplikasi Umum Layanan Publik	Identifikasi aplikasi pada Bidang Kesehatan, Domain Aplikasi Umum, Area Aplikasi Umum Layanan Publik meliputi Kategori Aplikasi sebagai



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		berikut: a. Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS GOS); dan b. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kesehatan (SIMRS Kanza).
RAA.02 Aplikasi Khusus		
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Kesehatan, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: a. SIMRS RS Al Ihsan; b. SIMRS RS Jiwa; c. SIMRS RS Paru; d. SIMRS RS Jampang Kulon; e. Aplikasi untuk pendaftaran online Labkes (Checklist); dan f. Pendaftaran Online.

Tabel 5.25. Identifikasi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Sosial

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.02 Aplikasi Khusus		



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	<p>Identifikasi aplikasi pada Bidang Sosial, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sistem Informasi Kemandirian Remaja Panti Pemberdayaan Sosial Bina Remaja (SI ManJa); b. Pendaftaran - SI ManJa; c. CRM - SI ManJa; d. Website Resmi Dinas Sosial; e. Aplikasi Pintu Juara; f. SINONA - Absensi Internal Non ASN Dinsos Jabar; g. Sistem Pelatihan Online Pengembangan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial; dan h. Aplikasi berbasis web pengelolaan logistik kebencanaan di Bidang Linjamsos (Siloka).

Tabel 5.26. Identifikasi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Hukum dan Keamanan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.02 Aplikasi Khusus		
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Hukum dan Keamanan, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: a. Website resmi Satuan Polisi Pamong Praja; b. Sistem Informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (SIMBAKESBANGPOL) ; dan c. Website Bakesbangpol.

Tabel 5.27. Referensi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Pendidikan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.02 Aplikasi Khusus		
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Pendidikan, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: a. Laporan Kinerja Pegawai (e-LKP);



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>b. Sistem Informasi Pendidikan Terpadu Juara (SIPINTER);</p> <p>c. Data Sinkronisasi Sekolah;</p> <p>d. Sistem Informasi dan Koordinasi Antar Setda Kabupaten/Kota Bidang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat;</p> <p>e. Jabar Future Leaders Scholarship;</p> <p>f. Manajemen Data Perencanaan dan Pelaporan Berdayaguna;</p> <p>g. Sarana Inspirasi Menulis dan Publikasi Ilmiah Jurnal Guru Jawa Barat;</p> <p>h. Piagam Penghargaan Digital (DIAGRAM);</p> <p>i. Sistem Seleksi Bakal Calon Kepala Sekolah;</p> <p>j. Website Resmi Dinas Pendidikan;</p> <p>k. PPDB Jabar;</p> <p>l. Aplikasi Pendaftar PPDB Jawa Barat;</p> <p>m. Aplikasi Sekolah PPDB Jawa Barat;</p> <p>n. Aplikasi Online</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Penetapan Angka Kredit;</p> <p>o. Website resmi UPTD TIKomDIK;</p> <p>p. Sistem Pendataan Kepegawaian Guru dan Tenaga Kependidikan;</p> <p>q. Aplikasi Bidang Pembinaan SMA Disdik Jabar;</p> <p>r. Aplikasi Penunjang Penatausahaan Keuangan Dinas Pendidikan; dan</p> <p>s. Sistem Informasi Tenaga Kependidikan dan Siswa Terpadu Juara, yang mengampu data Rotasi Mutasi Tenaga Kependidikan (Guru), Penilaian Kinerja untuk Tenaga Kependidikan yang bersumber dari Siswa dan Komite Sekolah, dan Data ASN dan Non ASN pada Unit Kerja Sekolah baik Negeri maupun Swasta (SIGESITJUARA).</p>

Tabel 5.28. Referensi Aplikasi Pemerintah Daerah Bidang Pemerintahan Umum



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAA.01 Aplikasi Umum		
RAA.01.02	Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan	Identifikasi aplikasi pada Bidang Pemerintahan Umum, Domain Aplikasi Umum, Area Aplikasi Umum Administrasi Pemerintahan meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: a. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIDEBAR).
RAA.02 Aplikasi Khusus		
RAA.02.01	Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu	Identifikasi aplikasi pada Bidang Pemerintahan Umum, Domain Aplikasi Khusus, Area Aplikasi Khusus Fungsi Tertentu meliputi Kategori Aplikasi sebagai berikut: a. Website Resmi Bappeda; b. Aplikasi Pocket Bappeda; c. Website Badan Pengelola Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung; d. Website Resmi Corporate Social Responsibility Jabar; e. E-MONEV;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>f. Website KPBU (Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha);</p> <p>g. Website Saberpungli Jawa Barat;</p> <p>h. Aplikasi Geodatabase Pusdalisbang;</p> <p>i. Aplikasi Si Rampak Sekar;</p> <p>j. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;</p> <p>k. Aplikasi Layanan Perpustakaan (Inlislite);</p> <p>l. Surat Jabar Juara (SUARA);</p> <p>m. Website resmi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;</p> <p>n. Aplikasi Arsip Statis;</p> <p>o. Wakaf Buku Jabar Juara Literasi;</p> <p>p. Website Resmi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Jawa Barat;</p> <p>q. Aplikasi Pengolahan Data perhitungan Gaji dan Tunjangan;</p> <p>r. Aplikasi Aset Jabar;</p> <p>s. Sistem Informasi Rekonsiliasi Pajak;</p> <p>t. Website resmi Badan Kepegawaian</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Daerah;</p> <p>u. Kuesioner Perilaku (PeerReview);</p> <p>v. Sistem Informasi Aparatur Pemerintah;</p> <p>w. Aplikasi Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) Provinsi Jawa Barat;</p> <p>x. Aplikasi Kehadiran Mobile (K-MOB);</p> <p>y. Aplikasi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UKP) dan Ujian Dinas (UDIN);</p> <p>z. Seleksi Terbuka Badan Kepegawaian Daerah;</p> <p>aa. Aplikasi e-kartu;</p> <p>bb. Aplikasi e-pensiun;</p> <p>cc. Aplikasi e-kgb;</p> <p>dd. Aplikasi e-cuti;</p> <p>ee. Aplikasi e-assessment;</p> <p>ff. Aplikasi e-fungsional;</p> <p>gg. Aplikasi pendidikan lanjutan (dilan);</p> <p>hh. Aplikasi Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional dan Pengajuan Diklat Khusus Jabatan Fungsional (Sibangkom);</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		ii. Aplikasi box talenta (Sistem 9Box); jj. Aplikasi e-pangkat (kepin); kk. Aplikasi qr code generator dokumen SK pangkat; ll. Aplikasi e-mutasi internal (salaman); mm. Aplikasi analisis formasi berdasarkan kinerja ASN (Sim Jawara TPK); nn. Sistem pemilihan pegawai terbaik (EOTM); oo. Sistem penilaian perilaku kinerja pegawai (Review dan Kuesioner); pp. Aplikasi arsip kepegawaian (Simpeg Administratif); qq. Aplikasi CAT Online Ujian Dinas dan UPKP; rr. Website Korpri; ss. Aplikasi e-Penghargaan; tt. Aplikasi Aplikasi TO CASN Juara; uu. Super Apps Kepegawaian; vv. Aplikasi rekomendasi PNS (e-rekom); ww. Aplikasi izin



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		perceraian pegawai (e-disiplin); dan xx. Aplikasi penetapan kebutuhan pegawai (e-formasi).

E. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE

Substansi arsitektur pada domain arsitektur infrastruktur SPBE, merujuk pada referensi arsitektur SPBE nasional memuat:

Tabel 5.29. Identifikasi Infrastruktur SPBE Domain Fasilitas Informasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAI.01.01 Pusat Data		
RAI.01.01.05	Pusat Data Pemulihan	Identifikasi infrastruktur pada Domain Fasilitas Informasi, Area Pusat Data, Kategori Infrastruktur Pusat Data Pemulihan meliputi: a. IaaS Lintasarta; b. Cloudeka Lintasarta; c. IGCP Kominfo; dan d. JabarCloud.

Tabel 5.30. Identifikasi Infrastruktur SPBE Domain Sistem Integrasi

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAI.02.01 Jaringan Intra Pemerintah		



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAI.02.01.02	Jaringan Intra Instansi Pusat	Identifikasi infrastruktur pada Domain Sistem Integrasi, Area Jaringan Intra Pemerintah, Kategori Jaringan Intra Instansi Pusat meliputi: a. JIP Pusat.
RAI.02.01.03	Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Identifikasi infrastruktur pada Domain Sistem Integrasi, Area Jaringan Intra Pemerintah, Kategori Jaringan Intra Pemerintah Daerah meliputi: a. JIP Daerah
RAI.02.02 Sistem Penghubung Layanan Pemerintah		
RAI.02.02.03	Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Identifikasi infrastruktur pada Domain Sistem Integrasi, Area Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Kategori Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah meliputi: a. SPLP Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tabel 5.31. Identifikasi Infrastruktur SPBE Domain Platform



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAI.03.01 Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi		
RAI.03.01.01	Server	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, Kategori Server meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. HP Proliant DL380 G6; b. Supermicro X9DRW-3LN4F+/X9DRW-3TF+; c. Supermicro X9DRW-3LN4F+/X9DRW-3TF+; d. Supermicro X9DRW-3LN4F+/X9DRW-3TF+; e. ProLiant DL380 G7; f. PowerEdge R710; g. PowerEdge R710; h. ProLiant DL580 G9; i. Supermicro X9DRW-3LN4F+/X9DRW-3TF+; j. CISCO BLADE UCS 5108: UCS B420 M4; k. Dell EMC R740; l. Dell EMC R740; dan m. Dell EMC R750.
RAI.03.01.02	Media Penyimpan (Data	Identifikasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Storage)	<p>infrastruktur pada Domain Platform, Area Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, Kategori Media Penyimpan (Data Storage) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. HP STORAGE WORKS 1/8 G2 TAPE AUTOLOADER; b. HP STORAGEWORKS P4300 G2; c. HP STORAGEWORKS X1400 G2 Network Storage; d. Pure Storage Flash Array / M10 R2 Controller; e. PELCO DIGITAL SENTRY DS SRV2 SERIES; f. DELL; g. FUJITSU SAS S3; h. FUJITSU ETERNUS DX100 S3 SAS; i. DELL EMC ME4024; j. Supermicro; k. DELL MD 3420; l. Huawei Oceanstor 5300 V3; m. DELL UNITY 380; n. DELL UNITY 380; o. HUAWEI OCEANSTOR



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		DORADO 3000 V6; p. HUAWEI OCEANSTOR DORADO 3000 V6; q. STORAGE NEC; dan r. STORAGE NEC.
RAI.03.01.03	Perangkat Keras Jaringan	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, Kategori Perangkat Keras Jaringan meliputi: a. Aruba HP 2530-24-PoE+; b. Aruba HPE 1920-8G; c. Cisco 4400 Series; d. Cisco ASR 1001-X; e. Cisco DS-C91482-K9; f. Cisco Nexus N9K-C93180YC-EX-24; g. Cisco Nexus N9K-C9396TX; h. Cisco WS-C2960-24TT-L; i. Cisco WS-C2960S-24TS-L; j. Cisco WS-C2960XR; k. Cisco WS-C3560G-24TS; l. D-Link DXS-1210-12TC; m. Dell Brocade ICX7250-24-HPOE;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		n. Dell ICX 7250-24P; o. Dell N4032F; p. Dell S4048-ON; q. Dell X-1026P; r. Edcore ECS4110-28T; s. GPON HA7100; t. HP ProCurve 2520G; u. Huawei ATN 910C; v. Huawei Quidway S2700 9TP-EI-AC; w. Juniper EX2200-24T-4G; x. Juniper EX3300-24T; y. Juniper EX4300-24T; z. Linksys E1200; aa. Mikrotik RB750Gr3 (hEX); bb. NetEngine AE6280; cc. Routerboard CCR1009-7G-1C-1S+; dd. Routerboard CCR1036-12G-4S; ee. Routerboard CCR1072-1G-8S+; ff. TP-Link T1600G-28TS; dan gg. UniFi Switch 16.
RAI.03.01.04	Perangkat Keras Keamanan	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, Kategori Perangkat Keras



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Keamanan meliputi: a. Fortigate 1200D; b. Palo Alto 3260; c. KEMP LoadMaster LM-X15; d. Netscout Fiber Optic TAPs; dan e. Fortigate 500D.
RAI.03.01.05	Peripheral	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, Kategori Peripheral meliputi: a. Optiplex 7050.
RAI.03.01.07	Perangkat Lunak Platform	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Kerangka Infrastruktur dan Aplikasi, Kategori Perangkat Lunak Platform meliputi: a. VMWare; b. Proxmox; c. ISPCconfig; d. Ubuntu 22.04 LTS; e. Centos 7; f. Ubuntu 20.04 LTS; g. CloudLinux; h. JunOS; i. Cisco IOS; j. FortiOS; k. PanOS; l. OpenBSD; m. DNOS; n. RouterOS; o. Windows 11;



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		p. Sundray; q. Windows Server; r. ArubaOS; s. Pluribus Netvisor OS; t. Unifi OS; dan u. VRP.
RAI.03.02 Komputasi Awan		
RAI.03.02.01	PaaS	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Komputasi Awan, Kategori PaaS meliputi: a. Hosting cPanel; b. ISPConfig 20.28; c. ISPConfig 1.110; d. ISPConfig 3.28; dan e. ISPConfig 1.122.
RAI.03.02.02	IaaS	Identifikasi infrastruktur pada Domain Platform, Area Komputasi Awan, Kategori IaaS meliputi: a. DISKOM-JABAR-ADPIM-vDC; b. DISKOM-JABAR-BUMD-vDC; c. DISKOM-JABAR-HUKUM-vDC; d. DISKOM-JABAR-KESRA-vDC; e. DISKOM-JABAR-ORG-vDC; f. DISKOM-JABAR-PEMOTDA-vDC; g. DISKOM-JABAR-



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		PBJ-vDC; h. DISKOM-JABAR-PMKS-vDC; i. DISKOM-JABAR-UMUM-vDC; j. DISKOM-JABAR-BKD-vDC; k. DISKOM-JABAR-Kepegawaian-vDC; l. DISKOM-JABAR-KESBANG-vDC; m. DISKOM-JABAR-BPBD-vDC; n. DISKOM-JABAR-BAPENDA-vDC; o. DISKOM-JABAR-BP2D-vDC; p. DISKOM-JABAR-BPKAD-vDC; q. DISKOM-JABAR-BPSDM-vDC; r. DISKOM-JABAR-BANHUB-vDC; s. DISKOM-JABAR-BAPPEDA-vDC; t. DISKOM-JABAR-DBMTR-vDC; u. DISKOM-JABAR-ESDM-vDC; v. DISKOM-JABAR-DISHUT-vDC; w. DISKOM-JABAR-DKP-vDC; x. DISKOM-JABAR-DISDUK-vDC; y. DISKOM-JABAR-DISKES-vDC; z. DISKOM-JABAR-



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		DKPP-vDC; aa. DISKOM-JABAR-INTERNAL-vDC; bb. DISKOM-JABAR-DISKUK-vDC; cc. DISKOM-JABAR-DLH-vDC; dd. DISKOM-JABAR-DISPARBUD-vDC; ee. DISKOM-JABAR-DPMD-vDC; ff. DISKOM-JABAR-DP3AKB-vDC; gg. DISKOM-JABAR-DISPORA-vDC; hh. DISKOM-JABAR-PTSP-vDC; ii. DISKOM-JABAR-DISDIK-vDC; jj. DISKOM-JABAR-DISHUB-vDC; kk. DISKOM-JABAR-INDAG-vDC; ll. DISKOM-JABAR-DISBUN-vDC; mm. DISKOM-JABAR-DISPUSIPDA-vDC; nn. DISKOM-JABAR-DISPERKIM-vDC; oo. DISKOM-JABAR-DINSOS-vDC; pp. DISKOM-JABAR-SDA-vDC; qq. DISKOM-JABAR-TPH-vDC; rr. DISKOM-JABAR-



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		DISNAKER-vDC; ss. DISKOM-JABAR-INSPEKTORAT-vDC; tt. DISKOM-JABAR-SATPOL-vDC; uu. DISKOM-JABAR-SETWAN-vDC; vv. DISKOM-JABAR-JDS-vDC; ww. BANDUNG-DISKOM-vDC; xx. KARAWANGKAB-DISKOM-vDC; yy. DISKOM-JABAR-TRK-vDC; zz. DISKOM-JABAR-SIPD-vDC; aaa. PVE-DMZ3-25; bbb. PVE-DMZ3-30; ccc. PVE-DMZ3-50; ddd. PVE-DMZ3-60; eee. PVE-DMZ-252; fff. PVE-DMZ-253; ggg. PVE-DMZ-172; hhh. PVE-PUB-02; iii. Cloudeka; jjj. IaaS Lintasarta; dan kkk. Jabar Cloud v1.

F. Domain Arsitektur Keamanan SPBE

Substansi arsitektur pada domain arsitektur keamanan SPBE, merujuk pada referensi arsitektur SPBE nasional memuat:

Tabel 5.32. Identifikasi Keamanan SPBE Domain Standar Keamanan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.01.01.01	K-001 Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)	Dokumen ini menjelaskan mengenai kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI)
RAK.01.01.02	K-002 Kerangka Kerja (Framework) Manajemen Risiko Keamanan Informasi	Dokumen ini menjelaskan mengenai kerangka kerja dalam pengisian manajemen risiko keamanan informasi
RAK.01.01.03	K-003 Kebijakan Ruang Lingkup Sertifikasi & SOA	Dokumen ini menjelaskan mengenai ruang lingkup sertifikasi SNI ISO 27001:2013 yang dijalankan oleh Diskominfo Jabar
RAK.01.01.04	K-004 Kebijakan Kelangsungan Layanan Data Center	Dokumen ini menjelaskan mengenai kebijakan terkait kelangsungan layanan Data Center
RAK.01.01.05	K-005 Kebijakan Peran dan Tanggung Jawab Keamanan Informasi	Dokumen ini menjelaskan mengenai Peran dan Tanggung Jawab Tim SMKI
RAK.01.01.06	K-006 Kebijakan Standar Kompetensi SMKI	Dokumen ini menjelaskan mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh Tim SMKI
RAK.01.01.07	K-007 Kebijakan Keamanan Pihak Ketiga dan Eksternal	Dokumen ini menjelaskan mengenai Keamanan Pihak



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		ketiga dan Eksternal
RAK.01.01.08	K-008 Kebijakan Perlindungan Data Pribadi	Dokumen ini menjelaskan mengenai perlindungan data pribadi
RAK.01.01.09	K-009 Rencana SMKI	Dokumen ini menjelaskan mengenai Rencana kegiatan yang dilakukan oleh Tim SMKI guna memastikan penerapan keamanan informasi di Diskominfo Jabar
RAK.01.01.10	SOP-001 Prosedur Pengendalian Dokumen	Dokumen ini menjelaskan mengenai prosedur pengendalian dokumen yang ada di Diskominfo Jabar
RAK.01.01.11	SOP-002 Prosedur Pengendalian Rekaman	Dokumen ini menjelaskan mengenai prosedur pengendalian rekaman
RAK.01.01.12	SOP-003 Prosedur Audit Internal	Dokumen ini menjelaskan mengenai prosedur untuk audit internal
RAK.01.01.13	SOP-004 Prosedur Komunikasi Internal dan Eksternal	Dokumen ini menjelaskan mengenai prosedur komunikasi internal dan eksternal
RAK.01.01.14	SOP-005 Prosedur Manajemen Review	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Manajemen



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Review
RAK.01.01.15	SOP-006 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Improvement	Dokumen ini menjelaskan mengenai
RAK.01.01.16	SOP-007 Prosedur Monitoring dan Evaluasi Penyedia	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Monitoring dan evaluasi penyedia
RAK.01.01.17	SOP-008 Prosedur Pengelolaan dan Penghancuran Removable Media	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Pengelolaan dan Penghancuran Removable Media
RAK.01.01.18	SOP-009 Prosedur Penanganan, Pelabelan dan Pertukaran Informasi	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Penanganan, Pelabelan dan Pertukaran Informasi
RAK.01.01.19	SOP-010 Prosedur Pengendalian Perubahan TI	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur mengenai Pengendalian Perubahan TI
RAK.01.01.20	SOP-011 Prosedur Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi	Dokumen ini menjelaskan mengenai Pengelolaan Insiden Keamanan Informasi
RAK.01.01.21	SOP-012 Prosedur Instalasi dan Kepatuhan Lisensi Software	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Instalasi dan Kepatuhan Lisensi Software
RAK.01.01.22	SOP-013 Pengendalian Hak Akses Teknologi	okumen ini menjelaskan mengenai



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Informasi (TI)	Prosedur Pengendalian Hak Akses TI
RAK.01.01.23	SOP-014 Prosedur Pengendalian Hak Akses TI	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Pengendalian Hak Akses TI
RAK.01.01.24	SOP-015 Prosedur Pengelolaan Patch	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Pengelolaan Patch
RAK.01.01.25	SOP-016 SOP Mobile Device dan Teleworking	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur mengenai mobile device dan teleworking
RAK.01.01.26	SOP-017 SOP Kepatuhan Terhadap Regulasi dan Aturan – Aturan Lain Yang Mendukung Layanan Utama	Dokumen ini menjelaskan mengenai Kepatuhan terhadap regulasi dan aturan-aturan lain yang mendukung layanan utama
RAK.01.01.27	SOP-018 SOP Kebersihan Meja dan Layar	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Kebersihan Meja dan Layar
RAK.01.01.28	SOP-019 SOP Kriptografi	Dokumen ini menjelaskan mengenai Kriptografi
RAK.01.01.29	SOP-020 SOP Tanggung Jawab Keamanan Informasi	Dokumen ini menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Keamanan Informasi
RAK.01.01.30	SOP-021 SOP	Dokumen ini



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Pengelolaan Aset	menjelaskan mengenai Prosedur Pengelolaan Aset
RAK.01.01.31	SOP-022 SOP Monitoring dan Pemeliharaan CCTV	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Monitoring dan Pemeliharaan CCTV
RAK.01.01.32	SOP-024 SOP Prosedur Keamanan Lingkungan	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Keamanan Lingkungan
RAK.01.01.33	SOP-025 SOP Tanggung Jawab SDM	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Tanggung Jawab SDM
RAK.01.01.34	SOP-026 SOP Prosedur Keamanan Operasional	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur mengenai Keamanan Operasional
RAK.01.01.35	SOP-027 SOP Prosedur Keamanan Jaringan dan Komunikasi	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Keamanan Jaringan dan Komunikasi
RAK.01.01.36	SOP-029 SOP Operasional Password	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur Operasional Password
RAK.01.01.37	SOP-030 SOP Pemeliharaan Perangkat IT dan Non IT Data Center	Dokumen ini menjelaskan mengenai Prosedur mengenai pemeliharaan perangkat IT dan Non



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		IT Data Center
RAK.01.01.38	SOP-032 SOP Penguatan Keamanan (Hardening) Perangkat TI	Dokumen ini menjelaskan mengenai prosedur penguatan perangkat TI
RAK.01.01.39	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)	Undang-undang ini membahas mengenai penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik
RAK.01.01.40	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan	Undang-undang ini membahas mengenai penyelenggara keterbukaan informasi publik



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Lembaran Negara Nomor 4846)	
RAK.01.01.41	Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)	Undang-undang ini membahas mengenai hak cipta dan hak tertentu
RAK.01.01.42	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).	Undang-undang ini membahas mengenai cipta kerja
RAK.01.01.43	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik	Peraturan ini membahas mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400)	
RAK.01.01.44	Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215)	Peraturan ini membahas mengenai sistem pemerintah berbasis elektronik
RAK.01.01.45	Peraturan Menteri Kominfo Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1829)	Peraturan ini membahas mengenai perlindungan data pribadi
RAK.01.01.46	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Peraturan ini membahas mengenai pedoman nomenklatur PD Provinsi dan Daerah Kab/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan
RAK.01.01.47	Peraturan Kepala Badan	Peraturan ini



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054)	membahas mengenai pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah
RAK.01.01.48	Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1375)	Peraturan ini membahas mengenai sistem pengamanan dalam penyelenggaraan sistem elektronik
RAK.01.01.49	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Peraturan ini membahas mengenai laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah
RAK.01.01.50	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis	Peraturan ini membahas mengenai pemantauan dan evaluasi SPBE



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Elektronik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 994)	
RAK.01.01.51	Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 540)	Peraturan ini membahas mengenai penyelenggaraan literasi media dan literasi keamanan siber
RAK.01.01.52	Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 541)	Peraturan ini membahas mengenai Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE
RAK.01.01.53	Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara	Peraturan ini membahas mengenai Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Republik Indonesia (Tahun 2021 Nomor 975)	
RAK.01.01.54	Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1339)	Peraturan ini membahas mengenai tentang Penyelenggaraan Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/IEC 27001 Menggunakan Indeks Keamanan Informasi
RAK.01.01.55	Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 248)	Peraturan ini membahas mengenai Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian
RAK.01.01.56	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 60 Tahun 2017 tentang	Peraturan ini membahas mengenai Tugas, Fungsi, Rincian



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Tugas, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
RAK.01.01.57	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Sertifikat Elektronik	Peraturan ini membahas mengenai Pemanfaatan Sertifikat Elektronik
RAK.01.01.58	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola SPBE	Peraturan ini membahas mengenai Tata Kelola SPBE
RAK.01.01.59	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Peraturan ini membahas mengenai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
RAK.01.01.60	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023	Peraturan ini membahas mengenai Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.01.01.61	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Peraturan ini membahas mengenai Peraturan Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
RAK.01.01.62	Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Peraturan ini membahas mengenai tentang Peraturan Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
RAK.01.01.63	Keputusan Gubernur Nomor 048.05/KEP.280-DISKOMINFO/2020 tentang Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat	Keputusan ini menetapkan Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat
RAK.01.01.64	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat Nomor 1200/KOM.03.05.02/S	Keputusan ini menetapkan Tim Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	ANDIKAMI tentang Tim Pengelola Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat	Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat
RAK.01.01.65	ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS) - Requirements	Merupakan suatu standar Internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems (ISMS)
RAK.01.01.66	ANSI/ASHRAE Standard 90.4-2016, Energy Standard for Data Centers	Standar ANSI/ASHRAE 90.4-2016, Standar Energi untuk Pusat Data, menetapkan persyaratan efisiensi energi minimum pusat data untuk desain dan konstruksi, untuk pembuatan rencana pengoperasian dan pemeliharaan dan untuk pemanfaatan energi terbarukan di dalam atau di luar lokasi sumber daya.
RAK.01.01.67	Pedoman Teknis Secure Software Development Lifecycle (SSDLC)	Dokumen ini menjelaskan mengenai teknis penerapan secure software



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		development cycle (SSDLC) dalam pengembangan aplikasi
RAK.01.01.68	Pedoman Teknis Pengamanan Aplikasi Berbasis Website	Dokumen ini menjelaskan mengenai teknis penerapan pengamanan aplikasi berbasis website
RAK.01.01.69	Layanan Konsultasi SSDLC	dokumen ini menjelaskan mengenai proses layanan konsultasi SSDLC

Tabel 5.33. Identifikasi Keamanan SPBE Domain Penerapan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.02.01 Edukasi Kesadaran Keamanan SPBE		
RAK.02.01.01	Webinar Sandikami Mania	<ul style="list-style-type: none"> a. Webinar Sandikamimania Series #1 b. Webinar Sandikamimania Series #2 c. Webinar Sandikamimania Series #3 d. Webinar Sandikamimania Series #4 e. Webinar Sandikamimania Series #5 f. Webinar



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>Sandikamimania Series #6</p> <p>g. Webinar Sandikamimania Series #7</p> <p>h. Webinar Sandikamimania Series #8</p> <p>i. Webinar Sandikamimania Series #9</p> <p>j. Webinar Sandikamimania Series #10</p> <p>k. Webinar Sandikamimania Series #11</p> <p>l. Webinar Sandikamimania Series #12</p> <p>m. Webinar Sandikamimania Series #13</p> <p>n. Webinar Sandikamimania Series #14</p> <p>o. Webinar Sandikamimania Series #15</p> <p>p. Webinar Sandikamimania Series #16</p> <p>q. Webinar Sandikamimania Series #17</p> <p>r. Webinar Sandikamimania Series #18</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		<p>s. Webinar Sandikamimania Series #19</p> <p>t. Webinar Sandikamimania Series #20</p> <p>u. Webinar Sandikamimania Series #21</p> <p>v. Webinar Sandikamimania Series #22</p> <p>w. Webinar Sandikamimania Series #23</p> <p>x. Webinar Sandikamimania Series #24</p> <p>y. Webinar Sandikamimania Series #25</p> <p>z. Webinar Sandikamimania Series #26</p> <p>aa. Webinar Sandikamimania Series #27</p> <p>bb. Webinar Sandikamimania Series #28</p> <p>cc. Webinar Sandikamimania Series #29</p> <p>dd. Webinar Sandikamimania Series #30</p> <p>ee. Webinar Sandikamimania</p>



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Series #31 ff. Webinar Sandikamimania Series #32 gg. Webinar Sandikamimania Series #33 hh. Webinar Sandikamimania Series #34 ii. Webinar Sandikamimania Series #35 jj. Webinar Sandikamimania Series #36
RAK.02.01.02	Sebarkami	a. Sebarkami #1 b. Sebarkami #2 c. Sebarkami #3 d. Sebarkami #4 e. Sebarkami #5 f. Sebarkami #6 g. Sebarkami #7 h. Sebarkami #8 i. Sebarkami #9 j. Sebarkami #10 k. Sebarkami #11 l. Sebarkami #12 m. Sebarkami #13 n. Sebarkami #14 o. Sebarkami #15 p. Sebarkami #16 q. Sebarkami #17 r. Sebarkami #18 s. Sebarkami #19 t. Sebarkami #20 u. Sebarkami #21 v. Sebarkami #22



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		w. Sebakami #23 x. Sebakami #24 y. Sebakami #25 z. Sebakami #26 aa. Sebakami #27 bb. Sebakami #28 cc. Sebakami #29 dd. Sebakami #30 ee. Sebakami #31 ff. Sebakami #32 gg. Sebakami #33 hh. Sebakami #34 ii. Sebakami #35 jj. Sebakami #36 kk. Sebakami #37 ll. Sebakami #38 mm. Sebakami #39 nn. Sebakami #40 oo. Sebakami #41 pp. Sebakami #42 qq. Sebakami #43 rr. Sebakami #44 ss. Sebakami #45 tt. Sebakami #46 uu. Sebakami #47 vv. Sebakami #48 ww. Sebakami #49 xx. Sebakami #50 yy. Sebakami #51 zz. Sebakami #52 aaa. Sebakami #53 bbb. Sebakami #54 ccc. Sebakami #55 ddd. Sebakami #56 eee. Sebakami #57 fff. Sebakami #58 ggg. Sebakami #59 hhh. Sebakami #60



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		iii. Sebarkami #61 jjj. Sebarkami #62 kkk. Sebarkami #63 lll. Sebarkami #64 mmm. Sebarkami #65 nnn. Sebarkami #66 ooo. Sebarkami #67 ppp. Sebarkami #68 qqq. Sebarkami #69 rrr. Sebarkami #70 sss. Sebarkami #71 ttt. Sebarkami #72 uuu. Sebarkami #73 vvv. Sebarkami #74 www. Sebarkami #75 xxx. Sebarkami #76 yyy. Sebarkami #77 zzz. Sebarkami #78 aaaa. Sebarkami #79 bbbb. Sebarkami #80 cccc. Sebarkami #81 dddd. Sebarkami #82 eeee. Sebarkami #83 ffff. Sebarkami #84 gggg. Sebarkami #85 hhhh. Sebarkami #86 iiii. Sebarkami #87 jjjj. Sebarkami #88 kkkk. Sebarkami #89 llll. Sebarkami #90 mmmm. Sebarkami #91 nnnn. Sebarkami #92 oooo. Sebarkami #93 pppp. Sebarkami #94 qqqq. Sebarkami #95 rrrr. Sebarkami #96 ssss. Sebarkami #97



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		tttt. Sebarkami #98 uuuu. Sebarkami #99 vvvv. Sebarkami #100 wwww. Sebarkami #101 xxxx. Sebarkami #102 yyyy. Sebarkami #103 zzzz. Sebarkami #104 aaaaa. Sebarkami #105 bbbbb. Sebarkami #106 cccc. Sebarkami #107 dddd. Sebarkami #108 eeee. Sebarkami #109 ffff. Sebarkami #110 gggg. Sebarkami #111 hhhh. Sebarkami #112 iiii. Sebarkami #113 jjjj. Sebarkami #114 kkkk. Sebarkami #115 llll. Sebarkami #116 mmmm. Sebarkami #117
RAK.02.02 Identifikasi Kerentanan Keamanan SPBE		
RAK.02.02.01	IT Security Assessment	Proses IT Security Assessment
RAK.02.02.02	Sistem Elektronik	Melakukan IT Security Assessment pada sistem elektronik milik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
RAK.02.03 Peningkatan Keamanan SPBE		



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.02.03.01	Pelatihan Sertifikasi Jaringan/Keamanan Jaringan/Comptia Network	Pelatihan memberikan kepada peserta berbagai pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi dan pemantauan terhadap keamanan jaringan, aplikasi, dan sistem operasi serta cara menangani atau melakukan respon terhadap pelanggaran keamanan
RAK.02.03.02	Pelatihan Keamanan Informasi ISO 27001:2013/Indeks KAMI	Indeks KAMI merupakan tools untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.
RAK.02.03.03	Pelatihan Keamanan Informasi/Penetration Testing Tahun 2019	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menemukan kerentanan dan kelemahan keamanan pada aplikasi berbasis web. Pentest (penetration test) ini menggunakan beberapa teknik dan 'serangan' yang tujuannya untuk menembus keamanan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		suatu web application.
RAK.02.03.04	Workshop Terkait Bidang Persandian dan Keamanan Informasi	Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan Security Awareness
RAK.02.03.05	Pelatihan SOC	Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan tim terkait Cyber Security. Tim SOC bertujuan untuk melindungi aset dan secara pro-active melakukan monitoring untuk mendeteksi adanya ancaman dan serangan sekaligus melakukan respon terhadap suatu insiden.
RAK.02.03.06	Pelatihan Pentest Kab/Kota Tahun 2020	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menemukan kerentanan dan kelemahan keamanan pada aplikasi berbasis web. Pentest (penetration test) ini menggunakan beberapa teknik dan 'serangan' yang tujuannya untuk menembus keamanan suatu web application.
RAK.02.03.07	Pelatihan CEH	Pelatihan Certified Ethical Hacker (CEH) adalah untuk meningkatkan sistem keamanan pada suatu perusahaan. Dalam pelatihannya, peserta



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		diberikan materi seperti Pengenalan Etika Peretasan, Social Engineering, Injeksi Perintah SQL hingga perestasan Jaringan Nirkabel.
RAK.02.03.08	Bimbingan Teknis ITSA Pentest (Virtual) Tahun 2021	Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas SDM dalam menemukan kerentanan dan kelemahan keamanan pada aplikasi berbasis web. Pentest (penetration test) ini menggunakan beberapa teknik dan 'serangan' yang tujuannya untuk menembus keamanan suatu web application.
RAK.02.03.09	Pelatihan audit internal SNI ISO 27001:2013	Kegiatan ini dilaksanakan secara daring via aplikasi zoom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Security Awareness.
RAK.02.03.10	Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi Bagi Penyelenggara Sistem Elektronik	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan Security Awareness
RAK.02.03.11	Bimbingan Teknis Kesiapsiagaan Insiden Siber Untuk CSIRT - Cyber Security Drill Test	Kegiatan ini dilaksanakan secara daring via aplikasi zoom. Kegiatan ini



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan SDM dalam pembentukan CSIRT di daerah, meningkatkan wawasan peserta dalam rangka penanganan insiden keamanan siber, hingga meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis terhadap risiko peretasan aplikasi sejak dini.
RAK.02.03.12	Bimbingan Teknis Indeks Keamanan Informasi Tahun 2022	Indeks KAMI merupakan tools untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah.
RAK.02.03.13	Desiminasi SNI ISO 27001:2013	Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian pegawai dalam melakukan pengamanan aset organisasi, meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku pada organisasi, hingga meningkatkan pemahaman pegawai



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		terhadap kontrol keamanan yang diatur SNI ISO.
RAK.02.03.14	Bimbingan Teknis Drill Test	Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan kemampuan SDM dalam pembentukan CSIRT di daerah, meningkatkan wawasan peserta dalam rangka penanganan insiden keamanan siber, hingga meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan analisis terhadap risiko peretasan aplikasi sejak dini.
RAK.02.03.15	Security Information and Event Management	Teknologi SIEM digunakan untuk mengumpulkan informasi keamanan yang berasal dari data log pada server aplikasi maupun firewall dan mengkorelasikan informasi tersebut menjadi suatu data yang digunakan untuk analisis
RAK.02.03.16	Endpoint Protection (Server)	Teknologi ini digunakan untuk melindungi perangkat Server, dari berbagai ancaman dengan defense techniques, meliputi: Malware prevention, Network Security, System Security



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.02.03.17	Endpoint Protection (Computer)	Teknologi ini digunakan untuk melindungi perangkat PC/Laptop, dari berbagai ancaman dengan defense techniques, meliputi: Malware prevention, Network Security, System Security
RAK.02.03.18	Web Application Firewall (WAF)	WAF merupakan sebuah firewall yang memonitor, memfilter, dan memblok data yang berasal dari client malicious ke sebuah website atau aplikasi web.
RAK.02.03.19	Vulnerability Assessment (VA)	Tools VA ini digunakan untuk memindai segala kemungkinan kerentanan pada aplikasi berbasis website.
RAK.02.03.20	Network Performance Monitoring and Diagnostics	Perangkat ini digunakan untuk monitoring traffic yang mengakses jaringan internal dimana paket data dapat terlihat secara transparan.
RAK.02.03.21	Penerapan SSL pada Website sapawarga.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website sapawarga.jabarprov.go.id
RAK.02.03.22	Penerapan SSL pada	Memberikan enkripsi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Website citarumharum.jabarprov.go.id	data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website citarumharum.jabarprov.go.id
RAK.02.03.23	Penerapan SSL pada Website https://pikobar.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://pikobar.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.24	Penerapan SSL pada Website http://jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website http://jabarprov.go.id/
RAK.02.03.25	Penerapan SSL pada Website diskominfo.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website diskominfo.jabarprov.go.id
RAK.02.03.26	Penerapan SSL pada Website https://diskes.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://diskes.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.27	Penerapan SSL pada Website https://sadata-diskes.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://sadata-



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		diskes.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.28	Penerapan SSL pada Website https://bp2d.jabarprov.go.id/home	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://bp2d.jabarprov.go.id/home
RAK.02.03.29	Penerapan SSL pada Website https://dprd.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://dprd.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.30	Penerapan SSL pada Website https://eosmosys.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://eosmosys.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.31	Penerapan SSL pada Website http://esdm.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website http://esdm.jabarprov.go.id
RAK.02.03.32	Penerapan SSL pada Website jelita	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website jelita
RAK.02.03.33	Penerapan SSL pada Website euis cantik	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		website euis cantik
RAK.02.03.34	Penerapan SSL pada Website https://dpmptsp.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website Dinas PMPTSP
RAK.02.03.35	Penerapan SSL pada Website jdih.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website jdih.jabarprov.go.id
RAK.02.03.36	Penerapan SSL pada Website birohukum.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website birohukum.jabarprov.go.id
RAK.02.03.37	Penerapan SSL pada Website sidatukdukcapil.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website sidatukdukcapil.jabarprov.go.id
RAK.02.03.38	Penerapan SSL pada Website https://smilingevent.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://smilingevent.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.39	Penerapan SSL pada Website https://tcc.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		https://tcc.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.40	Penerapan SSL pada Website Janari.Jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website Janari.Jabarprov.go.id
RAK.02.03.41	Penerapan SSL pada Website satpolpp.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website satpolpp.jabarprov.go.id
RAK.02.03.42	Penerapan SSL pada Website https://dpmdesa.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://dpmdesa.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.43	Penerapan SSL pada Website https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://badan-penghubung.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.44	Penerapan SSL pada Website https://e-monev.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://e-monev.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.45	Penerapan SSL pada Website dishut.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		website dishut.jabarprov.go.id
RAK.02.03.46	Penerapan SSL pada Website sigesitjuara.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website sigesitjuara.jabarprov.go.id
RAK.02.03.47	Penerapan SSL pada Website inspektorat.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website inspektorat.jabarprov.go.id
RAK.02.03.48	Penerapan SSL pada Website sekopercinta.jabarprov.go.id	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website sekopercinta.jabarprov.go.id
RAK.02.03.49	Penerapan SSL pada Website https://bakesbangpol.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://bakesbangpol.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.50	Penerapan SSL pada Website https://ilms.jabarprov.go.id/inlislite31/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://ilms.jabarprov.go.id/inlislite31/
RAK.02.03.51	Penerapan SSL pad	Memberikan enkripsi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Website https://dlh.jabarprov.go.id/	data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website https://dlh.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.52	Penerapan SSL pad Website http://biroadpim.jabarprov.go.id/	Memberikan enkripsi data melalui HTTPS yang akan melindungi data pengunjung website http://biroadpim.jabarprov.go.id/
RAK.02.03.53	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Kepegawaian Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
RAK.02.03.54	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		lingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
RAK.02.03.55	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
RAK.02.03.56	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Pendapatan Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Pendapatan Daerah
RAK.02.03.57	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
RAK.02.03.58	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
RAK.02.03.59	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
RAK.02.03.60	Penerapan Sertifikat	Menerapkan Tanda



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
RAK.02.03.61	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang
RAK.02.03.62	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		otentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
RAK.02.03.63	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Kehutanan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Kehutanan
RAK.02.03.64	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Kelautan Dan Perikanan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan
RAK.02.03.65	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
RAK.02.03.66	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Kesehatan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Kesehatan
RAK.02.03.67	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.02.03.68	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Komunikasi Dan Informatika
RAK.02.03.69	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Koperasi Dan Usaha Kecil
RAK.02.03.70	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Lingkungan Hidup	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
RAK.02.03.71	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan
RAK.02.03.72	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
RAK.02.03.73	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Pemberdayaan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
RAK.02.03.74	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Pemuda Dan Olahraga	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Pemuda Dan Olahraga
RAK.02.03.75	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
RAK.02.03.76	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Pendidikan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Pendidikan
RAK.02.03.77	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Perhubungan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Perhubungan
RAK.02.03.78	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
RAK.02.03.79	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Perkebunan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Perkebunan
RAK.02.03.80	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah
RAK.02.03.81	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
	tangan Elektronik pada Dinas Perumahan Dan Permukiman	(TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Perumahan Dan Permukiman
RAK.02.03.82	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Sosial	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Sosial
RAK.02.03.83	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Sumber Daya Air	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		lingkungan Dinas Sumber Daya Air
RAK.02.03.84	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Dan Hortikultura
RAK.02.03.85	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
RAK.02.03.86	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Inspektorat	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Inspektorat
RAK.02.03.87	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Satuan Polisi Pamong Praja	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
RAK.02.03.88	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Sekretariat DPRD	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Sekretariat Dprd
RAK.02.03.89	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Administrasi Pimpinan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan
RAK.02.03.90	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Bumd, Investasi Dan Administrasi Pembangunan	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Bumd, Investasi Dan Administrasi Pembangunan
RAK.02.03.91	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Hukum Dan Hak Asasi Manusia	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Hukum Dan Hak Asasi



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Manusia
RAK.02.03.92	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Kesejahteraan Rakyat	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Kesejahteraan Rakyat
RAK.02.03.93	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Organisasi	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Organisasi
RAK.02.03.94	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		otentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah
RAK.02.03.95	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Pengadaan Barang Dan Jasa	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Pengadaan Barang Dan Jasa
RAK.02.03.96	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Perekonomian	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Perekonomian
RAK.02.03.97	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Biro Umum	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan,



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Biro Umum
RAK.02.03.98	Penerapan Sertifikat Elektronik untuk Tanda tangan Elektronik pada Badan Penghubung	Menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi pada dokumen elektronik di lingkungan Badan Penghubung
RAK.02.04 Penanganan Insiden Keamanan SPBE		
RAK.02.04.01	Insiden Defacement Attack pada Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat	Tim JabarProv-CSIRT menemukan adanya serangan defacement attack.
RAK.02.05 Audit Keamanan SPBE		
RAK.02.05.01	Audit SNI ISO 27001:2013	Sertifikasi ISO 27001 merupakan suatu standar internasional dalam menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems (ISMS)



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.02.05.02	Audit Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Indeks KAMI (Keamanan Informasi) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) penerapan keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kriteria pada SNI ISO/IEC 27007
RAK.02.05.03	Cyber Security Framework (CSF)	Merupakan Instrumen asesmen teknis kerangka kerja keamanan siber untuk sistem pemerintah berbasis elektronik
RAK.02.05.04	Cyber Security Maturity (CSM)	merupakan alat bantu untuk mengukur kematangan keamanan siber organisasi. diharapkan organisasi dapat melakukan peningkatan pengelolaan keamanan siber serta memastikan pengelolaan tersebut berjalan optimal dan berfungsi secara menyeluruh
RAK.02.05.05	Evaluasi Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Evaluasi Pelaksanaan Persandian merupakan salah satu bentuk pelaksanaan pengawasan teknis urusan Persandian di



Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
		Pemerintah Daerah. Evaluasi yang dilakukan yakni melakukan pengukuran atau penilaian terhadap ketaatan Pemerintah Daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan Persandian yang ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
RAK.02.05.06	Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	merupakan instrumen untuk mengukur tingkat penanganan insiden siber

Tabel 5.34. Identifikasi Keamanan SPBE Domain Kelaikan Keamanan

Kode	Referensi Arsitektur	Deskripsi Referensi Arsitektur
RAK.03.01 Kelaikan Keamanan Aplikasi SPBE		
RAK.03.01.01	Uji Kelaikan Aplikasi SIDEBAR	Pengajuan uji kelaikan penggunaan aplikasi sejenis kearsipan dinamis menggunakan aplikasi SIDEBAR



BAB VI

PERATURAN PERALIHAN

Dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

BAB VII

PENUTUP

Arsitektur SPBE Pemda ini merupakan panduan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan adanya penyalarsan antara Arsitektur SPBE Instansi Pusat, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Provinsi, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Arsitektur SPBE Nasional, diharapkan tercipta sinergi penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,

